



G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan OPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrua, atau (2) Basis Kas Menuju Akrua. Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Pematangsiantar mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar selama Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas, manajerial, transparansi atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Posisi sumberdaya ekonomi, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah;
- b. Perubahan posisi sumberdaya ekonomi, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah;
- c. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
- d. Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar;
- e. Cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- q. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Pematangsiantar dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
- s. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- w. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- x. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**
 - 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
 - 1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar
 - 2. Ekonomi Makro
 - 3. Kebijakan Keuangan
 - 4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi**
 - 1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 3. Asumsi Dasar yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
 - 1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Surplus/Defisit
 - d. Pembiayaan
 - 2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 7. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan.**
- Bab VII Penutup.**



BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR,
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar

1. Dasar Hukum

Pemerintah Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

2. Letak Geografis dan Topografi

Secara geografis, Wilayah Kota Pematangsiantar seluas 79.970 Km² berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun dan terletak 400-500 meter di atas permukaan laut yang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara setelah Medan terdiri atas 8 Kecamatan dan 53 Kelurahan.

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00" - 6' 35" Bujur Timur.

3. Visi dan Misi

Pemerintah Kota Pematangsiantar memiliki visi :

“ Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas “

Sedangkan misi Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah :

- a. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas;
- b. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, kesehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.
- d. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara;
- e. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

4. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintahan Kota Pematangsiantar ditetapkan melalui beberapa Peraturan Daerah, yakni :

- a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
- b. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
- c. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- d. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
- e. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
- f. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar.

Secara keseluruhan, organisasi perangkat daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah, membawahi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi;
2. DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Sekretariat DPRD;
4. Dinas Daerah sebanyak 17 dinas, yakni :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f. Dinas Ketenagakerjaan
 - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - h. Dinas Lingkungan Hidup
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - k. Dinas Perhubungan
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 - p. Dinas Pariwisata
 - q. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas 5 Badan, 1 Satuan dan Inspektorat , yakni :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Inspektorat
6. Kecamatan sebanyak 8 kecamatan
7. Kelurahan sebanyak 53 kelurahan.

B. Ekonomi Makro

Ekonomi daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian nasional dan regional Sumatera Utara, diestimasikan masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat krisis keuangan global berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi aksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Pembangunan ekonomi Kota Pematangsiantar saat ini diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang dibarengi oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*), kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan perubahan struktur ekonomi daerah.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kelompok masyarakat rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun 2022, maka pertumbuhan ekonomi kota Pematangsiantar tahun 2023 masih tetap kuat dan tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif, berlatar pendidikan rendah, miskin, dan tidak terampil dan diupayakan tetap dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sebagai upaya perluasan kesempatan kerja.

C. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumberdaya keuangannya sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan Pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai pelaksana pembangunan di Kota Pematangsiantar, pada TA 2023 telah disediakan anggaran belanja yang salah satunya bersumber dari APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Perumusan program/kegiatan dalam APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan siklus perencanaan pembangunan daerah tersebut, maka proses penganggaran daerah dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan yang dituangkan dalam RKPD untuk tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme pembahasan APBD untuk tahun perencanaan diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap KUA dan setelah disepakati dilanjutkan dengan pembahasan PPAS yang akan menjadi bahan dan pedoman dalam penyusunan R-APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 pengungkapan informasi pencapaian Mandatory Spending (kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur) sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Amanat dan Anggaran Mandatory Spending TA 2023

No.	Uraian	Amanat	Anggaran
1	Kesehatan	10 %	26,80 %
2	Pendidikan	20 %	24,82 %
3	Infrastruktur	40%	26,81 %

D. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Pencapaian kinerja makro Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya, merupakan salah satu amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator penilai. Beberapa indikator pembentuk IPM, meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Indeks Daya Beli dan rata-rata lama sekolah. Secara kumulatif, angka IPM Kota Pematangsiantar menempati rangking kedua untuk wilayah Sumatera Utara dengan nilai 80,46. Kondisi IPM Kota Pematangsiantar dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut Tahun 2019 yaitu 78,57, Tahun 2020 yaitu 78,57, Tahun 2021 meningkat menjadi 79,17, Tahun 2022 meningkat menjadi 79,70, Tahun 2023 meningkat menjadi 80,46. Kondisi



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

ini masih berada di atas indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 75,13 pada Tahun 2022.

Kontribusi bidang kesehatan untuk IPM tergambar dari indeks angka harapan hidup yang menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Angka harapan hidup di Kota Pematangsiantar pada Tahun 2023 sebesar 74,75 meningkat sebesar 0,5 dari Tahun 2022 sebesar 74,25 yang berarti penduduk Kota Pematangsiantar yang lahir per Tahun 2022 akan mempunyai harapan untuk mencapai umur 74 sampai dengan 75 tahun. Kondisi ini masih berada di atas indeks harapan hidup Provinsi Sumatera Utara yaitu senilai 73,67. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya layanan bidang kesehatan dan antusias masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Untuk indikator pendidikan yang digunakan menghitung IPM adalah angka melek huruf. Kemampuan membaca dan menulis penduduk Kota Pematangsiantar relatif baik, dimana hampir semua penduduk bisa membaca dan menulis. Salah satu faktor adalah penduduk lanjut usia yang lahir disaat pembangunan belum sebaik sekarang ini, sebab terdapat kecenderungan semakin tinggi golongan umur semakin tinggi pula persentase penduduk yang buta huruf. Kondisi ini wajar, mengingat kondisi penduduk pada usia lanjut ketika memasuki usia sekolah belum banyak tersentuh pembangunan, khususnya pendidikan. Angka melek huruf ini sudah cukup memuaskan, namun masih perlu juga ditingkatkan dari tahun ke tahun hingga bebas dari buta huruf.

Kumulatif Pengeluaran perkapita Kota Pematangsiantar dalam periode 2021-2022 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,25% dan dalam periode 2022-2023 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,88%. Dan pada Tahun 2023 Pengeluaran Perkapita Kota Pematangsiantar mencapai 12.984. Kondisi ini menunjukkan Kota Pematangsiantar memiliki indeks daya beli yang baik. Daya beli digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian standar hidup layak. Indeks ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan semakin baiknya kondisi perekonomian pada akhirnya berdampak pada meningkatnya daya beli penduduk Kota Pematangsiantar.

Rata-rata lama sekolah bagi penduduk Kota Pematangsiantar juga mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sumatera Utara, rata-rata lama sekolah bagi penduduk Kota Pematangsiantar menempati ranking kedua untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu 11,58 tahun. Angka ini berada diatas indeks Provinsi Sumatera Utara senilai 9,82 tahun. Indeks ini menggambarkan bahwa secara umum penduduk Kota Pematangsiantar menyelesaikan pendidikan SMA rata-rata di kelas II dan III. Hal ini tentu dikarenakan tingginya kesadaran warga Kota Pematangsiantar akan pentingnya aspek pendidikan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu prasyarat landasan pembangunan yang harus dipenuhi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil menjadi sasaran dan kondisi



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

yang diharapkan dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sehingga dapat mendukung kemajuan bidang lainnya.

Tercatat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar sebesar 4,82%. Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar Tahun 2020 mengalami perlambatan yaitu -1,89%. Pada tahun 2021 mengalami percepatan yaitu mencapai 1,25%. Pada Tahun 2022 mengalami percepatan yaitu 3,47%. Dan pada Tahun 2023 mengalami percepatan lagi yakni mencapai 4,22%.

b. Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro perekonomian yang sangat penting, sehingga dalam penyusunan APBN inflasi dijadikan sebagai salah satu variabel yang menentukan besaran APBN. Sebagai salah satu indikator makro stabilitas perekonomian, tingkat inflasi harus selalu dicermati dan dikendalikan. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, oleh sebab itu pengendalian inflasi harus tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah harus berperan serta dalam mengendalikan inflasi. Laju inflasi Provinsi Sumatera Utara untuk Kota Pematangsiantar dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tahun 2019 sebesar 1,54%, Tahun 2020 sebesar 2,78%, Tahun 2021 sebesar 2,12%, Tahun 2022 sebesar 6,16%, dan pada Tahun 2023 sebesar 2,30%.

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Namun salah satu kelemahan ukuran ini adalah bahwa besarnya PDRB perkapita suatu daerah belum tentu dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut karena PDRB perkapita itu didapat dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada Tahun 2023, PDRB Kota Pematangsiantar atas dasar harga berlaku meningkat senilai 6,41% sedangkan PDRB Kota Pematangsiantar atas dasar harga konstan meningkat senilai 3,91%, hal ini menggambarkan nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan sektor-sektor ekonomi yang terus bertambah.

d. Pengangguran Terbuka/Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan instabilitas politik keamanan dan sosial sehingga



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada Tahun 2019 berada pada indeks 8,60% dan mengalami peningkatan pada Tahun 2020 yaitu berada pada indeks 9,98%, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan berada pada indeks 11,00%, pada Tahun 2022 mengalami penurunan berada pada indeks 9,36%. Dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 yang berada pada indeks 8,62%.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada TA 2023 anggaran belanja daerah Kota Pematangsiantar ditetapkan sebesar Rp1.121.271.420.577 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada PAD sebesar Rp150.640.864.207. Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebesar Rp806.348.437.285 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp153.605.614.944 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar selama TA 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2023

Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi di Atas/ (di Bawah) Anggaran	
			Rp	%
1 Pendapatan	967.665.805.633,00	957.576.696.388,14	(10.089.109.245,86)	98,96
a. Pendapatan Asli Daerah	150.640.864.207,00	141.077.643.140,14	(9.563.221.067,86)	93,65
b. Pendapatan Transfer	806.348.437.285,00	806.613.330.222,00	264.892.937,00	100,03
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.676.504.141,00	9.885.723.026,00	(790.781.115,00)	92,59
2 Belanja	1.121.271.420.577,00	1.006.555.682.689,49	(114.715.737.887,51)	89,77
a. Belanja Operasi	878.799.462.696,00	788.864.357.870,49	(89.935.104.825,51)	89,77
b. Belanja Modal	230.583.932.775,00	210.552.779.715,00	(20.031.153.060,00)	91,31
c. Belanja Tidak Terduga	11.888.025.106,00	7.138.545.104,00	(4.749.480.002,00)	60,05
3 Surplus/Defisit	(153.605.614.944,00)	(48.978.986.301,35)	104.626.628.642,65	31,89
4 Pembiayaan	153.605.614.944,00	153.605.614.944,00	0,00	100,00
a. Penerimaan	160.105.614.944,00	160.105.614.944,00	0,00	100,00
b. Pengeluaran	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	100,00
5 SiLPA tahun berjalan	-	104.626.628.643,24	104.626.628.643,24	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp957.576.696.388,14 dari target yang ditetapkan sebesar Rp967.665.805.633,00 atau 98,96%. PAD terealisasi sebesar Rp141.077.643.140,14 atau 93,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.640.864.207,00. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp806.613.330.222,00 atau 100,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp806.348.437.285,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Rp9.885.723.026,00 atau 92,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.676.504.141,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan atas pengembalian Hibah pada BUMD dan pendapatan dana JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp878.799.462.696,00 dan direalisasikan sebesar Rp788.864.357.870,49 atau sebesar 89,77%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

No.	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	468.869.586.169,00	427.219.680.929,00	91,12
2	Belanja Barang dan Jasa	364.024.681.342,00	316.210.038.134,49	86,86
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah/Subsidi	44.042.695.185,00	43.572.226.107,00	98,93
5	Belanja Bantuan Sosial	1.862.500.000,00	1.862.412.700,00	100,00
	Jumlah	878.799.462.696,00	788.864.357.870,49	89,77

Belanja Modal diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada TA 2023, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp230.583.932.775,00 dan terealisasi sebesar Rp210.552.779.715,00 atau 91,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

No.	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	21.200.000.000,00	9.177.000.000,00	43,29
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.412.300.686,00	49.299.321.838,00	92,30
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.086.101.864,00	25.113.445.730,00	96,27
4	Belanja Modal Jalan.Irigasi dan Jaringan	126.479.143.859,00	123.706.035.301,00	97,81
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.256.861.366,00	3.142.566.846,00	96,49
6	Belanja Modal Aset Lainnya	149.525.000,00	114.410.000,00	76,52
	Jumlah	230.583.932.775,00	210.552.779.715,00	91,31

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.888.025.106,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.138.545.104,00 atau sebesar 60,05%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023

No.	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	11.888.025.106,00	7.138.545.104,00	60,05
	Jumlah	11.888.025.106,00	7.138.545.104,00	60,05

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target penerimaan pembiayaan sebesar Rp160.105.614.944,00 dan direalisasikan sebesar Rp160.105.614.944,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 100,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini ditujukan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Defisit anggaran Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp153.605.614.944,00 dalam realisasinya menjadi surplus sebesar Rp48.978.986.301,35. Surplus ini berasal dari realisasi Penerimaan Daerah sebesar Rp957.576.696.388,14 dikurangi realisasi Belanja sebesar Rp1.006.555.682.689,49. Efisiensi surplus sebesar Rp48.978.986.301,35 ditambah dengan efisiensi Pembiayaan sebesar Rp153.605.614.944,59 menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp104.626.628.643,24.

- 2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**
- Pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023, baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja Daerah, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan mengerahkan segala upaya dan kemampuan daerah. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar selama Tahun 2023 antara lain disebabkan:
- Kurangnya sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas;
 - Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Kota Pematangsiantar (baik Pajak maupun Retribusi Daerah berupa Pengelolaan Kekayaan Daerah);
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Situasi perekonomian menurun akibat adanya krisis keuangan global, dengan adanya kenaikan beberapa komponen penting, yang diperkirakan akan berdampak kepada berkurangnya daya beli masyarakat Kota Pematangsiantar;
 - Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia;
 - Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;
 - Jadwal pelaksanaan belanja APBD Kota Pematangsiantar yang terlambat dari semestinya;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- h. Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi Surat Edaran Wali Kota tentang batas waktu akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh OPD;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar menerapkan SAP Berbasis Akrua, yang terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

1) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yang ada di Kota Pematangsiantar terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada di Kota Pematangsiantar adalah seluruh OPD yang berada di lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, dan Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023

No.	Kode	OPD
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan
3	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
6	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

8	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
10	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	7.01.2.13.0.00.02.0000	Kantor Camat Siantar Barat
12	7.01.2.13.0.00.01.0000	Kantor Camat Siantar Timur
13	7.01.2.13.0.00.03.0000	Kantor Camat Siantar Utara
14	7.01.2.13.0.00.04.0000	Kantor Camat Siantar Selatan
15	7.01.2.13.0.00.06.0000	Kantor Camat Siantar Martoba
16	7.01.2.13.0.00.05.0000	Kantor Camat Siantar Marihat
17	7.01.2.13.0.00.07.0000	Kantor Camat Siantar Sitalasari
18	7.01.2.13.0.00.08.0000	Kantor Camat Siantar Marimbun
19	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan
21	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
26	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
27	2.17.3.30.3.31.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
28	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
30	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata
31	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
33	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

LKPD Kota Pematangsiantar TA 2023 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

LKPD ini tidak mencakup entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

LKPD Kota Pematangsiantar TA 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari PPKD/BUD dan OPD (Dinas/Badan/Kantor).

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran OPD menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Surplus/Defisit;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Surplus/Defisit-LRA;
4. Pembiayaan;
5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
- 4) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- 5) Lain-lain
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Aset lain-lain
- 8) Kewajiban jangka pendek;
- 9) Kewajiban jangka panjang;
- 10) Ekuitas.

d) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Manfaat Informasi Arus Kas adalah sebagai:

- *Aktivitas Operasi*

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
Penerimaan Perpajakan;

- 1) Penerimaan Perpajakan;
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 3) Penerimaan Hibah;
- 4) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya;
- 5) Penerimaan Lain-lain/Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa; dan
- 6) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran,
antara lain :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang;
- 3) Bunga;
- 4) Subsidi;
- 5) Hibah;
- 6) Bantuan Sosial
- 7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- 8) Transfer Keluar.

- *Aktivitas Investasi Aset Non keuangan*

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap;
- (b) Penjualan Aset Lainnya.
- (c) Pencairan Dana Cadangan
- (d) Penerimaan dari Divestasi
- (e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- (a) Perolehan Aset Tetap;
- (b) Perolehan Aset Lainnya.
- (c) Pembentukan Dana Cadangan
- (d) Penyertaan Modal Pemerintah
- (e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

- *Aktivitas Pendanaan*

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka
panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
- (b) Penerimaan dari Utang Obligasi;
- (c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
- (d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

- (a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
- (b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- (c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- (d) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

- *Aktivitas transitoris*

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

e) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- (b) cakupan entitas pelaporan;
- (c) periode yang dicakup;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) satuan angka yang digunakan.

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO
- (b) Beban
- (c) Surplus/Defisit dari Operasi
- (d) Kegiatan Non Operasional
- (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- (f) Pos Luar Biasa
- (g) Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan

- 4) Ekuitas akhir.

g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengakuan pendapatan-LRA;
- b) Pengakuan pendapatan-LO
- c) Pengakuan belanja;
- d) Pengakuan beban;
- e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- f) Investasi;
- g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- h) Kontrak-kontrak konstruksi;
- i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- k) Biaya penelitian dan pengembangan;
- l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- m) Dana cadangan;
- n) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

2) Asumsi Dasar yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggaran yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai entitas pelaporan dan OPD di lingkup Pemerintahan Kota Pematangsiantar sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit pemerintahan dalam laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Setiap entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumberdaya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumberdaya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Dalam pengertian kestinambungan entitas adalah bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam jangka waktu panjang dan tidak dimaksudkan untuk dibubarkan.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang rupiah. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3) Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar, yaitu:

a) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kota Pematangsiantar adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan Laporan Operasional dan beban dalam Laporan Operasional.

Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

b) Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Nilai perolehan (*historis*) lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini jika tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar aktiva atau kewajiban terkait.

c) Prinsip Realisasi (Realization Principle)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

d) Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka perbedaan transaksi tersebut akan tertera dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dibagi menjadi periode-periode pelaporan, seperti triwulan, semesteran dan tahunan, sehingga posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat diukur dan ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam semester sebelumnya dalam bentuk Laporan Semesteran dan Prognosis untuk enam bulan berikutnya, sedangkan pelaporan triwulan digunakan untuk evaluasi atas pencapaian pendapatan dan realisasi atau serapan dana yang dibelanjakan oleh entitas pelaporan.

f) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Prinsip akuntansi yang harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau CaLK.

h) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar diarahkan untuk menyajikan dengan wajar LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CaLK serta Laporan Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

4) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pematangsiantar adalah:

1. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi cukup diungkapkan pada CaLK.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar menggunakan nilai perolehan historis.

3. Koreksi Kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan belum diterbitkan dan atau telah diterbitkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pematangsiantar TA 2018 telah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Pematangsiantar TA 2018 telah



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Pematangsiantar TA 2018 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar, meliputi:

1) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

A. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Pengakuan

Secara umum pengakuan aset dilakukan:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan

B. Investasi Jangka Pendek

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- ii. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

PIUTANG

Pengakuan

Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

yaitu pada saat :

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (2) jumlah piutang dapat diukur;
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pemerintah Kota Pematangsiantar menyajikan Piutang sebesar nilai bersih yang dapat dircalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian Pengakuan

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

Pemerintah Kota Pematangsiantar melaksanakan penghapustagihan piutang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5 milyar oleh Kepala Daerah, sedangkan kewenangan penghapusan piutang di atas Rp. 5 milyar oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar, berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d) jaminan atau sita jaminan.

Penghapusbukuan piutang Pemerintah Kota Pematangsiantar diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

PERSEDIAAN

Pengakuan

Persediaan diakui:

- (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b) jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengakuan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

INVESTASI JANGKA PANJANG



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengakuan

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

1. Deviden Tunai;
2. Deviden Saham; dan
3. Bagian Laba.

Pengukuran

- *Investasi Permanen*

Pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- *Investasi non permanen*

Pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen yaitu:

- a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Penyajian dan Pengungkapan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

C. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan berdasarkan pada harga perolehan.

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pengeluaran untuk per satuan alat-alat kesehatan/kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengakuan, Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Tanah*
Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
- *Peralatan dan Mesin*
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- *Gedung dan Bangunan*
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
- *Jalan, Jaringan dan Instalasi*
biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
- *Aset Tetap Lainnya*
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

PERTUKARAN ASET

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima

ASET DONASI

Pemerintah Kota Pematangsiantar mencatat aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

PENYUSUTAN

Metode penyusutan yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

1. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak diperkenankan karena



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini Laporan Keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial yang signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

DANA CADANGAN

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke Dana Cadangan.

Pengukuran

Pemerintah Kota Pematangsiantar mengukur dana cadangan sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan penambah Dana Cadangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. Aset Lainnya

Pengakuan

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pematangsiantar dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

Pengukuran

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

2) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Pematangsiantar saat ini terdiri dari Utang Luar Negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah Kota Pematangsiantar pinjaman dari *Asian Development Bank*.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Pematangsiantar pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan *kurs* mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang Bunga atas Utang Pemerintah Kota Pematangsiantar dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari Utang Pemerintah Kota Pematangsiantar dari dalam maupun luar negeri. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk bagian lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kebijakan Akuntansi telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah Kota Pematangsiantar di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability* berupa pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) diungkapkan dalam catatan penting lainnya pada LKPD ini.

c. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban Kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Pematangsiantar, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

3) **PENDAPATAN**

Pendapatan adalah semua Penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar

▪ **PENDAPATAN LRA**

Pemerintah Kota Pematangsiantar Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

Pemerintah Kota Pematangsiantar menyajikan Pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS, berupa :

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

▪ **PENDAPATAN TRANSFER – LRA**

Pengakuan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengukuran

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian

Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kota Pematangsiantar disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas yang disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

▪ **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LRA,
- b. Dana Darurat – LRA,
- c. Pendapatan Lainnya – LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA *diakui* pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA *disajikan* dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) **BELANJA**

Belanja adalah semua Pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tak Terduga

5) PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- (a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- 1) Surplus/Defisit - LRA
- 2) Pembiayaan Netto
- 3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
- 4) Perubahan SAL

Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

6) PENDAPATAN – LO

Pengakuan

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

7) BEBAN

Pengakuan

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
- b. Saat terjadinya konsumsi aset
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban bebanyang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan klasifikasi ekonomi:

- a. Beban Operasi
yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain
- b. Beban Non Operasional
- c. Beban Luar Biasa
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan schubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.

5) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengakuan Pendapatan - LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02 dan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Kas atas pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, Kas atas pendapatan yang telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan, Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan, adalah merupakan Pendapatan LRA yang diakui menjadi Pendapatan Daerah.

b. Pengakuan Belanja

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pematangsiantar.

c. Metode Penilaian Akuntansi

Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan Penilaian Investasi dengan 3 (tiga) metode, yaitu :

1. *Metode Biaya*, yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. *Metode Ekuitas*, yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.
3. *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan*, jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Kota Pematangsiantar dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan

Tahun 2023
Rp957.576.362.303,14

Tahun 2022
Rp939.644.478.550,33

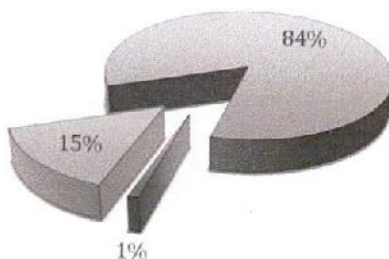
Pada TA 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp967.665.805.633,00 dan terealisasi Rp957.576.362.303,14 atau 98,96% dari anggaran. Pendapatan Daerah untuk TA 2023 yang diterima Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	150.640.864.207,00	141.077.643.335,14	93,65	154.210.931.232,33
2	Pendapatan Transfer	806.348.437.285,00	806.612.995.939,00	100,03	777.721.034.846,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.676.504.141,00	9.885.723.029,00	92,59	7.712.512.472,00
	Jumlah	967.665.805.633,00	957.576.362.303,14	98,96	939.644.478.550,33

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2022, maka realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.931.883.752,81 atau 1,87 %.

Gambar 5.1
Perbandingan Pos-Pos Penerimaan Daerah
TA 2023



□ Pendapatan Asli Daerah □ Dana Transfer / Perimbangan □ Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 84,00% dari total Pendapatan Daerah.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp141.077.643.335,14 **Rp154.210.931.232,33**

Pendapatan Asli Daerah untuk TA 2023 yang telah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp141.077.643.335,14 terdiri dari:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	83.300.000.000,00	82.887.630.340,00	99,50	76.809.964.223,00
2	Retribusi Daerah	25.920.690.000,00	11.247.068.850,00	43,39	11.538.882.600,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	10.204.020.207,00	10.204.020.207,00	100,00	10.281.206.262,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	31.216.154.000,00	36.738.923.938,14	117,69	55.580.878.147,33
	Jumlah	150.640.864.207,00	141.077.643.335,14	93,65	154.210.931.232,33

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan sebesar Rp13.133.287.897,19 atau 9,31 % jika dibandingkan PAD TA 2022 sebesar Rp154.210.931.232,33.

a) **Pendapatan Pajak Daerah** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp82.887.630.340,00 **Rp76.809.964.223,00**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung Pendapatan dari Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 sebesar Rp82.887.630.340,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	3.700.000.000,00	3.352.116.028,00	90,60	3.065.681.585,00
2	Pajak Restoran	12.800.000.000,00	13.320.398.083,00	104,07	10.306.882.718,00
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.332.246.090,00	88,82	1.413.798.599,00
4	Pajak Reklame	4.000.000.000,00	3.668.404.000,00	91,71	3.305.394.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.474.147.863,00	102,26	20.231.504.854,00
6	Pajak Parkir	650.000.000,00	597.297.278,00	91,89	518.092.250,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	650.000.000,00	611.438.000,00	94,07	556.530.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	11.000.000.000,00	8.905.661.280,00	80,96	9.794.355.085,00
9	BPHTB	28.000.000.000,00	29.625.921.718,00	105,81	27.617.725.132,00
	Jumlah	83.300.000.000,00	82.887.630.340,00	99,50	76.809.964.223,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan rincian di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.077.666.117,00 atau 7,33% dari realisasi Pendapatan Pajak TA 2022 sebesar Rp76.809.964.223,00.

b) Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 Tahun 2022
Rp11.247.068.850,00 Rp11.538.882.600,00

Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang implementasinya diatur dengan peraturan daerah. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	23.582.090.000,00	10.151.617.650,00	43,05	9.595.255.500,00
1	Pelayanan kesehatan	150.000.000,00	149.068.000,00	99,38	133.814.000,00
2	Pelayanan persampahan/ kebersihan	5.751.090.000,00	2.546.264.900,00	44,27	2.520.745.500,00
3	Pelayanan penguburan/pemakaman	21.000.000,00	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
4	Pelayanan parkir di tepi jalan umum	17.000.000.000,00	7.173.993.000,00	42,20	6.685.528.000,00
5	Pengujian kendaraan bermotor	550.000.000,00	182.441.750,00	33,17	171.703.000,00
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	13.780.000,00	27,56	30.000.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	66.720.000,00	111,20	35.190.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	715.000.000,00	500.917.000,00	70,06	456.651.500,00
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000,00	90.550.000,00	82,32	77.100.000,00
2	Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	26.362.000,00	52,72	19.261.500,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000.000,00	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
4	Tempat rekreasi dan olahraga	55.000.000,00	1.400.000,00	2,55	0,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	1.623.600.000,00	594.534.200,00	36,62	1.486.975.600,00
1	Retribusi persetujuan bangunan gedung	1.500.000.000,00	550.914.200,00	36,73	1.422.265.600,00
2	Izin tempat penjualan minuman beralkohol	10.000.000,00	750.000,00	7,50	750.000,00
3	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	113.600.000,00	42.870.000,00	37,74	63.960.000,00
	Jumlah	25.920.690.000,00	11.247.068.850,00	43,39	11.538.882.600,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pendapatan retribusi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp25.920.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.247.068.850,00 atau 43,39%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp291.813.750,00 atau 2,53% bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2022 sebesar Rp11.538.882.600,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp10.204.020.207,00 **Rp10.281.206.262,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk TA 2023 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan dividen, yang terdiri dari:

Tabel 5.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Deviden PDAM Tirtauli	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	500.000.000,00
2	Deviden Bank Sumut	9.504.020.207,00	9.504.020.207,00	100,00	9.781.206.262,00
	Jumlah	10.204.020.207,00	10.204.020.207,00	100,00	10.281.206.262,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Dividen yang berasal dari PDAM dan Bank Sumut pada TA 2023 sebesar Rp10.204.020.207,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp10.204.020.207,00. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.186.055,00 atau 0,75% bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dividen TA 2022 sebesar Rp10.281.206.262,00.

d) **Lain-lain PAD yang Sah** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp36.738.923.938,14 **Rp55.580.878.147,33**

Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	310.000.000,00	222.761.129,00	71,86	756.124.942,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	410.000.000,00	1.011.234.428,000	246,64	22.750.000,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	601.348.338,00
4	Jasa giro	3.446.154.000,00	3.607.820.448,00	104,69	3.769.175.631,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.752.807.938,00	0,00	0,00
6	Pendapatan bunga	500.000.000,00	218.825,92	0,04	0,00
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	250.000.000,00	111.868.257,00	44,75	2.657.982.986,92
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	181.141.637,17	0,00	306.452.733,16
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.104.910.957,67	110,49	33.002.185,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	762.092.422,00	0,00	888.428.054,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
12	Pendapatan dari pengembalian	300.000.000,00	1.019.440.945,38	339,81	379.331.392,25
13	Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00	26.961.326.950,00	107,85	46.166.281.885,00
	JUMLAH	31.216.154.000,00	36.738.923.938,14	117,69	55.580.878.147,33

Berdasarkan rincian di atas diketahui bahwa realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2023 sebesar Rp36.738.923.938,14 atau 117,69% dari anggaran sebesar Rp31.216.154.000,00 Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.841.954.209,19 atau 51,29% bila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp55.580.878.147,33.

2) **Pendapatan Transfer** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp806.612.995.939,00 **Rp777.721.034.846,00**

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atasan dalam hal ini APBD Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana Perimbangan selain dimaksudkan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Transfer TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pemerintah Pusat TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
I	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.591.534.000,00	31.447.748.818,00	113,98	37.535.276.039,00
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.020.215.000,00	1.932.875.400,00	95,68	5.692.574.267,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.447.215.000,00	15.823.867.818,00	117,67	13.258.252.919,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	1.479.562.000,00	0,00	2.479.721.210,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.377.181.000,00	6.377.181.000,00	100,00	4.810.481.888,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	12.581.000,00	0,00	33.201.500,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	27.422.000,00	14.841.000,00	54,12	46.549.308,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000,00	168.479.600,00	207,64	261.922.092,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty	1.457.361.000,00	1.457.361.000,00	100,00	8.973.520.587,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.921.059.000,00	2.921.059.000,00	100,00	308.565.168,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00	1.259.941.000,00	100,00	1.670.487.100,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
II	Dana Alokasi Umum	576.259.190.000,00	575.941.925.178,00	99,94	552.755.271.500,00
1	DAU	576.259.190.000,00	532.014.811.178,00	92,32	552.755.271.500,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	10.600.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	33.327.114.000,00	0,00	0,00
III	Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK	17.152.768.000,00	22.750.573.432,00	132,63	14.731.433.221,00
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	645.812.000,00	645.162.400,00	99,90	270.930.600,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	1.243.056.000,00	1.154.146.067,00	92,85	1.289.875.650,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	1.810.841.000,00	1.633.553.592,00	90,21	2.589.076.600,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	314.821.500,00
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	288.922.189,00
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	439.768.120,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.591.050.725,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	2.187.011.000,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	0,00	4.616.767.000,00	0,00	1.509.969.064,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	21.368.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.805.882.548,00
12	DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler	3.993.758.000,00	3.993.758.000,00	100,00	1.390.590.750,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana	806.248.000,00	2.710.200.316,00	336,15	876.930.619,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	2.259.469.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pengendalian Penyakit	2.258.284.000,00	2.154.300.000,00	95,40	2.342.246.856,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan	4.135.300.000,00	3.299.289.125,00	79,78	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00	356.385.932,00	0,00	0,00
IV	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	114.514.873.905,00	106.021.180.305,00	92,58	98.779.822.509,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.028.715.391,00	41.044.655.396,00	100,04	38.256.930.865,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.292.500.000,00	1.292.500.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik TPG PNSD	47.278.279.920,00	38.199.520.000,00	80,80	46.180.814.900,00
4	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	72.000.000,00	8.256.814.720,00	11.467,80	212.325.000,00
5	DAK Non Fisik BOP PAUD	2.893.800.000,00	2.866.044.000,00	99,04	2.149.226.000,00
6	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	676.100.000,00	676.100.000,00	100,00	582.000.000,00
7	DAK Non Fisik BOKKB BOK	8.280.021.168,00	9.641.081.983,00	116,44	7.959.539.000,00
8	DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	379.205.090,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik BOKKB Akreditasi Puskesmas	8.213.402.198,00	0,00	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
10	DAK Non Fisik BOKKB BOKB	3.696.441.902,00	3.696.441.902,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik PK2UMK	356.385.932,00	0,00	0,00	202.100.000,00
12	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	348.022.304,00	348.022.304,00	100,00	276.696.781,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	1.976.181.457,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	225.900.000,00
15	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	588.400.000,00
16	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	169.708.506,00
V	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	10.436.540.000,00
VII	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	65.830.071.380,00	65.830.071.380,00	100,00	52.521.391.577,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.223.647.617,00	16.223.647.617,00	100,00	10.939.707.790,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.848.914.746,00	8.848.914.746,00	100,00	3.699.995.028,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.910.594.965,00	23.910.594.965,00	100,00	18.193.824.215,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	722.912.785,00	722.912.785,00	100,00	313.800.757,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.124.001.267,00	16.124.001.267,00	100,00	19.374.063.787,00
VIII	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	4.621.831.109,00	92,44	10.961.300.000,00
	Jumlah	806.348.437.285,00	806.613.330.222,00	100,03	777.721.034.846,00

Berdasarkan rincian di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp806.613.330.222,00 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp806.348.437.285,00. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.892.295.376,00 atau 3,58% bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp777.721.034.846,00. Hal ini disebabkan karena turunya penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 Tahun 2022
Rp9.885.723.029,00 Rp7.712.512.472,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Rp9.885.723.029,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.8

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	894.000.000,00	59,60	1.020.000.000,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.176.504.141,00	8.991.723.029,00	97,99	6.692.512.472,00
	Jumlah	10.676.504.141,00	9.885.723.029,00	92,59	7.712.512.472,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp894.000.000,00 merupakan realisasi Pendapatan Hibah dari Kementerian PUPR untuk program hibah air minum perkotaan dalam rangka meningkatkan akses air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana pendapatan hibah tersebut menjadi bagian sumber dana yang disalurkan kepada PDAM Tirtauli sebagai pelaksana kegiatan atas program hibah air minum perkotaan melalui pos anggaran pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah. Sedangkan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dicatat senilai Rp8.991.723.029,00.

b. Belanja	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp1.006.549.418.862,49	Rp885.629.154.464,00

Belanja Daerah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.121.271.420.577 dengan realisasi sebesar Rp1.006.549.418.862,49 atau 89,77% dari anggaran, sehingga terdapat efisiensi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp114.722.001.714,51.

Rincian realisasi Belanja Daerah melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	878.799.462.696	788.884.206.660,49	89,77	738.286.808.493,00
2	Belanja Modal	230.583.932.775	210.526.667.098,00	91,30	137.106.916.201,00
3	Belanja Tak Terduga	11.888.025.106	7.138.545.104,00	60,05	10.235.429.770,00
4	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.121.271.420.577	1.006.549.418.862,49	89,77	885.629.154.464,00

Berdasarkan tabel realisasi di atas diketahui bahwa realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp1.006.549.418.862,49 mengalami kenaikan sebesar Rp120.920.264.398,49 atau 12,01% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp885.629.154.464,00.

1) Belanja Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp788.884.206.660,49	Rp738.286.808.493,00

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	468.869.586.169,00	427.219.680.929,00	91,12	429.518.075.890,00
2	Belanja Barang dan Jasa	364.024.681.342,00	316.229.886.924,49	86,87	272.059.802.571,00
3	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah/Subsidi	44.042.695.185,00	43.572.226.107,00	98,93	29.447.634.182,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.862.500.000,00	1.862.412.700,00	100,00	7.261.295.850,00
	Jumlah	878.799.462.696	788.884.206.660,49	89,77	738.286.808.493,00

Berdasarkan rincian di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp788.864.357.870,49 atau 89,77% dari anggaran sebesar Rp878.799.462.696,00. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp50.597.398.167,49 atau 6,85% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp738.286.808.493,00.

a) Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp427.219.680.929,00 atau 91,12% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.298.394.961,00 atau 0,54% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp429.518.075.890,00. Adapun rincian Belanja Pegawai dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Gaji dan tunjangan	308.314.558.730,00	276.855.133.062,00	89,80	278.220.820.296,00
1	Belanja Gaji Pokok PNS	197.575.206.540,00	196.401.157.774,00	99,41	206.272.925.203,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	36.626.759.136,00	12.242.683.100,00	33,43	2.934.627.100,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.661.297.113,00	17.528.495.033,00	99,25	18.279.595.424,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.594.535.547,00	962.937.736,00	60,39	247.113.516,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.489.037.450,00	6.374.750.190,00	98,24	6.485.564.950,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.333.149.325,00	13.253.828.265,00	99,41	13.433.836.671,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.513.784.101,00	1.382.256.000,00	91,31	369.315.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.810.008.110,00	2.774.556.360,00	98,74	2.982.492.800,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.657.235.366,00	10.589.637.915,00	99,37	11.165.749.580,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.157.698.879,00	758.599.500,00	65,53	194.882.220,00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	223.971.597,00	220.194.800,00	98,31	230.277.688,00
12	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.251.204,00	2.638.686,00	81,16	2.765.593,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	249.041,00	137.023,00	55,02	32.554,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.101.088.601,00	12.132.905.488,00	75,35	13.842.118.784,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	544.286.720,00	544.212.459,00	99,99	90.244.872,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
16	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	480.000.000,00	402.760.645,00	83,91	421.467.708,00
17	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	851.878,00
18	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.440.000.000,00	1.205.726.303,00	83,73	1.264.403.122,00
19	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	83.000.000,00	57.655.785,00	69,46	2.555.633,00
II	Tambahan penghasilan ASN	117.960.201.138,00	112.838.281.320,00	95,66	114.395.903.333,00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	63.077.451.138,00	61.961.686.058,00	98,23	59.654.403.071,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	390.600.000,00	0,00	0,00	64.290.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.819.285.957,00	1.771.786.062,00	62,85	3.519.643.042,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	51.672.864.043,00	49.104.809.200,00	95,03	51.157.567.220,00
III	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.331.242.000,00	7.561.321.013,00	90,76	5.215.691.121,00
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	128.000.000,00	97.454.375,00	76,14	100.800.000,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	439.000.000,00	438.922.600,00	99,98	302.400.000,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	53.000.000,00	39.510.375,00	74,55	42.000.000,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	141.000.000,00	105.361.000,00	74,72	107.520.000,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	710.000.000,00	709.985.500,00	100,00	672.000.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	23.000.000,00	17.118.887,00	74,43	16.800.000,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	23.000.000,00	17.121.163,00	74,44	16.800.000,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	335.500.000,00	251.625.000,00	75,00	230.800.556,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	854.000.000,00	854.000.000,00	100,00	557.846.485,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	74.521.800,00	93,15	52.000.000,00
11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	552.500.000,00	217.600.000,00	39,38	79.050.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	17.875.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	325.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	21.250.000,00	17.080.313,00	80,38	0,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	60.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.692.000,00	0,00	0,00	1.454.080,00
20	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.184.550.000,00	4.033.510.000,00	96,39	2.978.380.000,00
21	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.000.000,00	42.000.000,00	87,50	0,00
22	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	652.600.000,00	645.510.000,00	98,91	10.200.000,00
IV	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.341.564.816,00	12.105.662.712,00	98,09	12.136.724.712,00
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	665.490.000,00	99,06	671.790.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600,00	56.359.800,00	59,92	56.359.800,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.284.800,00	68.654.160,00	65,83	68.654.160,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	100,00	57.582.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	964.960.500,00	99,06	974.095.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.206.100,00	85.138.200,00	85,82	86.965.200,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.818.100,00	12.240.900,00	65,05	12.240.900,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	100,00	3.780.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	346.500.000,00	91,67	241.500.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	324.629.754,00	252.018.732,00	77,63	252.018.732,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	87.968.090,00	65.590.548,00	74,56	65.590.548,00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.393.968,00	1.381.968,00	99,14	1.381.968,00
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.145.904,00	4.145.904,00	100,00	4.145.904,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.980.800.000,00	2.980.800.000,00	100,00	2.268.000.000,00
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.276.800.000,00	4.276.800.000,00	100,00	3.596.400.000,00
V	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	681.552.316,00	465.652.494,00	68,32	439.582.538,00
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.800.000,00	29.400.000,00	53,85	32.400.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.024.000,00	2.940.000,00	97,22	2.718.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	52.920.000,00	53,85	58.320.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	2.027.760,00	50,00	2.172.600,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.556,00	656.894,00	88,94	337.299,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	840,00	37,50	1.020,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	16.290.000,00	12.487.500,00	76,66	14.898.000,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	56.160.000,00	56.032.000,00	99,77	44.694.000,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.750.000,00	5.062.500,00	75,00	6.207.500,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	18.000.000,00	13.500.000,00	75,00	15.891.200,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	90.900.000,00	90.825.000,00	99,92	99.320.000,00
12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.925.000,00	2.193.750,00	75,00	2.483.000,00
13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.925.000,00	2.193.750,00	75,00	2.483.000,00
14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.500.000,00	37.125.000,00	75,00	43.541.644,00
15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	93.533.295,00
16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	127.500.000,00	30.600.000,00	24,00	11.475.000,00
17	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.125.000,00	0,00	0,00	371.250,00
18	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	75.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.750.000,00	1.687.500,00	45,00	0,00
20	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000,00	0,00	0,00	8.531.250,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
21	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	852.000,00	0,00	0,00	204.480,00
VI	Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	560.880.000,00	490.853.518,00	87,51	649.662.608,00
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	226.800.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00	379.973.518,00	84,44	422.862.608,00
VII	Belanja Pegawai BLUD	20.679.587.169,00	16.902.776.810,00	81,74	18.459.691.282,00
	Jumlah	468.869.586.169,00	427.219.680.929,00	91,12	429.518.075.890,00

b) Realisasi Barang dan Jasa untuk TA 2023 sebesar Rp316.229.886.924,49 atau 86,87% dari anggaran sebesar Rp364.024.681.342,00. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.170.084.353,49 atau sebesar 16,24% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp272.059.802.571,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
I	Belanja barang pakai habis	84.119.150.575,00	71.874.277.984,00	85,44	52.258.583.514,00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.218.925.209,00	1.153.014.861,00	94,59	1.124.002.998,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	602.946.000,00	599.972.278,00	99,51	187.741.635,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.756.998.105,00	5.251.928.334,00	91,23	1.764.078.907,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	462.344.696,00	458.511.376,00	99,17	226.182.400,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.700.000,00	12.600.000,00	99,21	0,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.474.000,00	3.468.000,00	99,83	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	140.000.000,00	139.746.800,00	99,82	0,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.890.440.997,00	2.195.118.170,00	56,42	9.464.824.316,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	174.103.600,00	134.941.749,00	77,51	259.592.435,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.692.071.066,00	1.309.959.919,00	77,42	2.600.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	45.360.900,00	35.966.245,00	79,29	0,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.361.171.274,00	5.547.017.881,00	87,20	2.986.587.708,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.954.738.304,00	1.791.240.668,00	91,64	2.122.753.525,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.473.739.845,00	6.435.792.100,00	86,11	5.818.437.866,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	157.365.600,00	141.833.277,00	90,13	144.685.388,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.732.702.200,00	1.647.361.871,00	95,07	23.666.100,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.050.000,00	15.038.000,00	99,92	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	862.520.383,00	739.848.872,00	85,78	4.076.892.435,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	123.600.000,00	122.700.000,00	99,27	88.578.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	181.995.440,00	181.785.858,00	99,88	104.259.500,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	267.000.000,00	265.097.000,00	99,29	401.719.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.505.685.572,00	3.977.082.356,00	88,27	3.760.508.946,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.392.597.651,00	4.349.952.880,00	68,05	2.084.886.493,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	602.200.147,00	93.287.215,00	15,49	32.660.016,00
24	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.992.830.000,00	2.483.535.250,00	82,98	311.008.950,00
25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	14.304.300.928,00	13.756.787.356,00	96,17	600.953.384,00
26	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.855.237.646,00	1.652.916.545,00	89,09	1.691.082.516,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	151.058.000,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	263.250.000,00	262.836.000,00	99,84	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.861.158.912,00	7.304.192.702,00	82,43	5.348.091.359,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.745.481.100,00	3.579.531.789,00	95,57	2.258.558.341,00
31	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.882.795.000,00	941.533.051,00	50,01	1.745.279.000,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	67.710.000,00	57.815.000,00	85,39	58.765.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.731.163.000,00	3.577.039.145,00	95,87	3.956.782.366,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.000.000,00	17.775.540,00	98,75	12.000.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	520.500.000,00	513.970.000,00	98,75	368.129.200,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	108.765.000,00	107.815.000,00	99,13	0,00
38	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	286.338.000,00	260.740.300,00	91,06	335.684.200,00
39	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	15.000.000,00	14.815.170,00	98,77	0,00
40	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.000.000,00	9.876.780,00	98,77	5.000.000,00
41	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	58.436.530,00
42	Belanja Pakaian KORPRI	2.000.000,00	1.973.580,00	98,68	27.400.000,00
43	Belanja Pakaian Adat Daerah	274.620.000,00	200.370.946,00	72,96	118.030.000,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	458.100.000,00	437.959.120,00	95,60	229.950.000,00
45	Belanja Pakaian Olahraga	59.850.000,00	59.459.000,00	99,35	305.719.000,00
46	Belanja Pakaian Paskibraka	28.520.000,00	28.270.000,00	99,12	0,00
II	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.021.500.000,00	1.996.250.000,00	98,75	0,00
1	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	2.021.500.000,00	1.996.250.000,00	98,75	0,00
III	Belanja jasa kantor	112.795.190.566,00	97.321.830.585,00	86,28	94.584.296.126,00
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	313.200.000,00	305.400.000,00	97,51	905.500.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.290.150.000,00	1.520.703.900,00	66,40	1.334.400.000,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.384.674.000,00	6.013.066.505,00	94,18	13.457.155.089,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	60.200.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	201.400.000,00	143.200.000,00	71,10	263.260.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,	100.800.000,00	95.250.000,00	94,49	70.840.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website				
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	96.800.000,00
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	376.300.000,00	238.400.000,00	63,35	559.650.000,00
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	448.800.000,00	337.500.000,00	75,20	446.590.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.900.000.000,00	4.974.600.000,00	72,10	1.813.500.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.114.233.914,00	11.062.206.791,00	84,35	9.555.789.147,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	9.070.000,00	90,70	104.045.557,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.695.060.000,00	4.573.635.000,00	97,41	636.360.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	545.600.000,00	540.850.000,00	99,13	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	339.750.000,00	314.610.000,00	92,60	89.550.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	124.800.000,00	116.400.000,00	93,27	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	7.826.000.000,00	3.336.912.670,00	42,64	2.975.126.720,00
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	331.800.000,00	317.100.000,00	95,57	49.350.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.238.610.000,00	7.834.558.560,00	95,10	20.468.149.050,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.576.400.000,00	2.450.400.000,00	95,11	1.793.799.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.739.675.000,00	1.852.251.973,00	106,47	5.194.602.592,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.536.097.000,00	3.078.440.180,00	87,06	1.971.824.170,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.285.470.000,00	7.107.434.000,00	97,56	1.155.318.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.151.205.000,00	994.195.000,00	86,36	148.898.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	325.450.000,00	270.500.000,00	83,12	30.433.750,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	32.400.000,00	31.200.000,00	96,30	8.850.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00	247.767.000,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	169.800.000,00	166.800.000,00	98,23	42.700.000,00
30	Belanja Jasa Tata Rias	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35	0,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	170.000.000,00	169.689.528,00	99,82	44.390.299,00
33	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	34.250.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	76.408.000,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	372.614.690,00	334.264.690,00	89,71	71.217.108,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	26.000.000,00
37	Belanja Jasa Kalibrasi	216.476.593,00	170.010.017,00	78,54	24.478.000,00
38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.822.848.000,00	6.780.226.000,00	99,38	1.807.107.000,00
39	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.078.300.000,00	1.728.614.997,00	83,17	372.008.140,00
40	Belanja Tagihan Telepon	580.800.000,00	388.735.272,00	66,93	387.053.220,00
41	Belanja Tagihan Air	2.647.772.329,00	1.449.549.103,00	54,75	1.426.156.683,00
42	Belanja Tagihan Listrik	16.963.520.156,00	16.158.435.371,00	95,25	14.386.738.423,00
43	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	101.598.000,00	38.256.685,00	37,65	55.999.500,00
44	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.824.512.050,00	2.515.181.077,00	89,05	2.281.048.392,00
45	Belanja Penambahan Daya	127.551.834,00	127.478.003,00	99,94	34.919.990,00
46	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67	10.000.000,00
47	Belanja Pengolahan Air Limbah	400.000.000,00	289.014.375,00	72,25	563.919.796,00
48	Belanja Lembur	10.189.522.000,00	9.247.345.888,00	90,75	9.501.343.500,00
IV	Belanja iuran jaminan/asuransi	13.595.695.720,00	13.395.461.337,00	98,53	10.321.176.417,00
1	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00	5.775.619.948,00
2	Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.009.105.400,00	9.965.608.800,00	99,57	1.438.855.600,00
3	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.954.190.320,00	2.827.322.740,00	95,71	2.592.623.458,00
4	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	632.400.000,00	602.529.797,00	95,28	514.077.411,00
V	Belanja Sewa Tanah	55.000.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
VI	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.704.469.000,00	5.528.576.180,00	82,46	3.651.245.900,00
1	Belanja Sewa Excavator	366.000.000,00	366.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	297.420.000,00	146.906.000,00	49,39	23.600.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	27.000.000,00	15.000.000,00	55,56	900.000.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	592.200.000,00	352.200.000,00	59,47	79.200.000,00
7	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.267.549.000,00	3.566.558.880,00	83,57	1.867.108.400,00
8	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	917.300.000,00	845.411.300,00	92,16	781.337.500,00
9	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	0,00
VII	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.346.350.000,00	962.334.750,00	71,48	1.236.925.000,00
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	9.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	443.600.000,00	347.568.750,00	78,35	360.650.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	11.000.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	90.000.000,00	84.360.000,00	93,73	261.625.000,00
5	Belanja Sewa Hotel	681.750.000,00	404.406.000,00	59,32	539.650.000,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	60.000.000,00	55.000.000,00	91,67	55.000.000,00
VIII	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.233.861.750,00	9.541.578.255,00	84,94	3.968.418.000,00
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	74.000.000,00	73.500.300,00	99,32	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	500.000.000,00	496.725.000,00	99,35	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.291.750.000,00	1.197.419.975,00	92,70	1.357.281.900,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.489.300,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	6.033.750,00	6.000.000,00	99,44	99.844.500,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	2.410.000.000,00	1.743.272.410,00	72,33	249.066.600,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	67.450.000,00	11.322.000,00	16,79	35.100.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	342.070.500,00	341.070.800,00	99,71	677.352.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	124.000.000,00	123.731.500,00	99,78	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	954.300.000,00	835.359.800,00	87,54	88.367.100,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	587.348.000,00	289.950.700,00	49,37	99.994.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	719.049.500,00	616.723.445,00	85,77	298.969.600,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	820.000.000,00	816.912.525,00	99,62	148.851.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	99.567.000,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	37.860.000,00	36.970.800,00	97,65	0,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	3.300.000.000,00	2.952.619.000,00	89,47	714.535.000,00
IX	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.814.038.350,00	1.743.981.850,00	96,14	1.428.503.900,00
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	550.000.000,00	505.426.500,00	91,90	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.089.038.350,00	1.089.038.350,00	100,00	1.294.865.900,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	175.000.000,00	149.517.000,00	85,44	133.638.000,00
X	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.107.312.000,00	4.728.629.689,00	77,43	3.157.521.285,00
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.372.100.000,00	2.445.523.820,00	72,52	693.837.785,00
2	Belanja Sosialisasi	6.900.000,00	6.600.000,00	95,65	19.724.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	1.824.060.000,00	1.550.962.869,00	85,03	1.514.744.500,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	904.252.000,00	725.543.000,00	80,24	929.215.000,00
XI	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.052.750.000,00	978.924.175,00	92,99	834.981.320,00
1	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	24.750.000,00	20.685.075,00	83,58	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor				
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	37.000.000,00	28.052.125,00	75,82	34.302.000,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	128.000.000,00	127.986.200,00	99,99	102.906.000,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	16.000.000,00	11.353.125,00	70,96	14.292.500,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	41.000.000,00	30.275.000,00	73,84	36.588.800,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	207.000.000,00	206.981.000,00	99,99	228.680.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.000.000,00	4.921.962,00	70,31	5.717.000,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.000.000,00	4.919.688,00	70,28	5.717.000,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	165.000.000,00	123.750.000,00	75,00	138.157.800,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00	268.620.220,00
XII	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	217.236.000,00	108.500.000	49,95	69.329.400,00
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	40.000.000,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	170.000.000,00	68.000.000,00	40,00	28.050.000,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	0,00	0,00	825.000,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.136.000,00	0,00	0,00	454.400,00
XIII	Belanja Pemeliharaan Tanah	862.200.000,00	858.605.107,00	99,58	200.192.394,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	850.000.000,00	848.498.000,00	99,82	189.927.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	12.200.000,00	10.107.107,00	82,85	10.265.394,00
XIV	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.235.949.800,00	8.001.031.334,00	86,63	13.368.565.103,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	761.959.600,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	282.000.000,00	265.785.475,00	94,25	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	65.033.000,00	55.761.140,00	85,74	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.872.787.000,00	4.086.063.880,00	83,85	3.708.197.899,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.164.000,00	39.250.000,00	97,72	15.037.500,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.229.249.800,00	1.198.378.578,00	97,49	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.900.000,00	73.748.050,00	73,82	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	121.600.000,00	73.558.000,00	60,49	200.085.800,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	538.070.000,00	488.186.373,00	90,73	3.599.315.885,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	35.964.000,00	99,90	35.750.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.288.546.000,00	1.093.456.723,00	84,86	3.822.173.424,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	2.429.500,00	39,83	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	243.590.000,00	195.237.715,00	80,15	427.288.600,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	9.830.000,00	65,53	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	299.575.895,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	3.500.000,00	3.330.000,00	95,14	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	45.260.000,00	35.407.000,00	78,23	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	24.150.000,00	20.605.000,00	85,32	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	325.000.000,00	324.039.900,00	99,70	499.180.500,00
XV	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.419.288.172,00	7.188.203.738,00	85,38	13.782.299.267,00
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	7.832.788.172,00	6.603.735.838,00	84,31	9.224.522.259,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	188.884.500,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	186.500.000,00	184.945.000,00	99,17	1.412.172.489,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	35.760.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00	399.522.900,00	99,88	2.281.680.650,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	639.279.369,00
XVI	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.573.462.730,00	5.513.732.846,00	98,93	887.631.900,00
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	4.023.462.730,00	3.966.125.696,00	98,57	199.308.800,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	309.778.600,00
3	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	193.959.200,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Lain-Instalasi Lain	1.550.000.000,00	1.547.607.150,00	99,85	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	184.585.300,00
XVII	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	34.931.700,00	69,86	0,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	34.931.700,00	69,86	0,00
XVIII	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.513.071.793,00	39.395.123.734,00	77,99	33.098.199.747,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.145.150.051,00	31.911.456.134,00	77,56	26.638.948.747,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.207.355.742,00	7.366.817.600,00	80,01	6.459.251.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	152.950.000,00	116.850.000,00	76,40	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.616.000,00	0,00	0,00	0,00
XIX	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	201.072.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	201.072.000,00	0,00	0,00	0,00
XX	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.521.619.550,00	1.470.406.400,00	96,63	2.204.020.998,00
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	671.100.000,00	638.806.400,00	95,19	568.420.998,00
2	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	850.519.550,00	831.600.000,00	97,78	1.635.600.000,00
XXI	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.259.126.000,00	4.174.713.400,00	98,02	2.565.689.300,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.040.876.000,00	4.039.888.400,00	99,98	0,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	218.250.000,00	134.825.000,00	61,78	0,00
XXII	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.132.233.029,00	19.131.156.394,49	99,99	15.435.607.917,00
XXIII	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.194.104.307,00	22.281.637.466,00	96,07	18.944.115.083,00
	Jumlah	364.024.681.342,00	316.229.886.924,49	86,87	272.059.802.571,00

- c) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pembayaran bunga atas pinjaman jangka panjang. Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak memiliki pinjaman jangka panjang.
- d) Belanja Hibah diantaranya dialokasikan untuk pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/badan/lembaga/organisasi. Pada TA 2023 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp44.042.695.185,00 dengan realisasi sebesar Rp43.572.226.107,00 atau 98,93% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.124.591.925,00 atau 47,97% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 sebesar Rp29.447.634.182,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.13
Belanja Hibah TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
I	Belanja Hibah Uang Pemerintah Pusat	12.680.000.000,00	12.480.000.000,00	98,42	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.680.000.000,00	12.480.000.000,00	98,42	0,00
II	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	2.035.000.000,00	2.035.000.000,00	100,00	4.236.226.000,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.035.000.000,00	2.035.000.000,00	100,00	1.505.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	2.731.226.000,00
III	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	5.947.273.693,00	5.740.713.282,00	96,53	5.693.574.186,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.947.273.693,00	5.740.713.282,00	96,53	5.693.574.186,00
IV	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	71.810.000,00	71,81	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	71.810.000,00	71,81	0,00
V	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	135.000.000,00	110.000.000,00	81,48	25.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	135.000.000,00	110.000.000,00	81,48	0,00
VI	Belanja Hibah Dana BOS	22.294.300.000,00	22.283.581.571,00	99,95	18.641.712.742,00
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.294.300.000,00	22.283.581.571,00	99,95	18.641.712.742,00
VII	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	851.121.492,00	851.121.254,00	100,00	851.121.254,00
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	851.121.492,00	851.121.254,00	100,00	0,00
	Jumlah	44.042.695.185,00	43.572.226.107,00	98,93	29.447.634.182,00

Realisasi belanja hibah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.572.226.107,00 termasuk didalamnya sebesar Rp2.035.000.000,00, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp5.947.273.693,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp135.000.000,00, Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp22.294.300.000 dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada delapan Partai Politik (parpol) penerima Bantuan Keuangan yang mendapat kursi di DPRD



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

periode 2019-2024 sebesar Rp851.121.492,00. Pada TA 2023 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Pada TA 2023, belanja bantuan yang diperuntukkan kepada parpol dianggarkan dan direalisasikan pada pos belanja hibah.

- e) Belanja Bantuan Sosial direalisasikan untuk pemberian bantuan sosial Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga, Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Pada TA 2023 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp1.862.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.862.412.700,00 atau 100% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami Penurunan sebesar Rp5.792.143.550,00 atau 75,67% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2022 sebesar Rp7.654.556.250,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.14
Belanja Bantuan Sosial TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	5.537.850.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	612.500.000,00	612.500.000,00	100,00	447.656.250,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.250.000.000,00	1.249.912.700,00	99,99	1.240.789.600,00
Jumlah		1.862.500.000,00	1.862.412.700,00	100,00	7.261.295.850,00

2) **Belanja Modal**

Tahun 2023 **Tahun 2022**
Rp210.526.667.098,00 **Rp137.106.916.201,00**

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
I	Belanja Modal Tanah	21.200.000.000,00	9.177.000.000,00	43,29	9.133.470.000,00
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tetap Kerja	10.200.000.000,00	0,00	0,00	9.133.470.000,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	11.000.000.000,00	9.177.000.000,00	83,43	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
II	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.412.300.686,00	49.273.209.221,00	92,25	30.000.219.636
1	Belanja Modal Mesin Proses	465.862.400,00	415.528.410,00	89,20	64.824.000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.567.800.000,00	1.567.320.000,00	99,97	0,00
3	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	44.400.000,00	43.049.900,00	96,96	0,00
4	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.120.000.000,00	990.000.000	88,39	2.120.200.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.495.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	261.525.000,00	238.592.000	91,23	941.600.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	484.056.700,00	420.220.000,00	86,81	325.279.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	53.841.500,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	1.638.000.000,00
10	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	3.746.250,00
12	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	11.237.875,00
13	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	425.000,00	0,00	0,00	329.712.693,00
14	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	54.550.000,00
15	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	842.400,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
17	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.566.119.527,00	3.287.596.236,00	92,19	5.900.274.424,00
18	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	124.356.800,00
19	Belanja Modal Alat Dapur	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.423.143.528,00	2.259.500.621,00	93,25	71.215.000,00
21	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	877.359.458,00	874.253.158,00	99,65	4.635.500,00
22	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	395.000.000,00	394.900.000,00	99,97	0,00
24	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.380.434,00	9.350.000,00	99,68	53.800.000,00
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.254.000,00	6.834.500,00	73,85	10.400.000,00
26	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	16.498.272.301,00	15.845.563.619,00	96,04	8.173.953.864,00
27	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
28	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	868.270.000,00	649.500.000,00	74,80	222.867.516,00
29	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	41.118.750,00	32.681.730,00	79,48	0,00
30	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	73.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	7.254.620.000,00	6.970.897.000,00	96,09	1.260.089.000,00
32	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	210.411.350,00
33	Belanja Modal Personal Computer	111.400.000,00	111.100.000,00	99,73	101.666.500,00
34	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	404.400.000,00	400.625.000,00	99,07	75.889.998,00
35	Belanja Modal Peralatan Jaringan	68.219.426,00	67.489.000,00	98,93	318.722.987,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
36	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.015.345.375,00	3.872.612.710,00	96,45	4.398.969.096,00
37	Belanja Modal Elektronik/Electric	6.476.940.000,00	6.381.269.600,00	98,52	321.462.400,00
38	Belanja Modal Baju Pengaman	11.000.000,00	10.989.000,00	99,90	0,00
39	Belanja Modal Topi Kerja	244.800,00	244.200,00	99,75	0,00
40	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	161.400.000,00	11.000.000,00	6,82	143.100.000,00
21	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	177.596.512,00	168.315.000,00	94,77	548.697.176,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.119.765.605,00	2.088.734.979,00	98,54	1.684.070.327,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.364.539.470,00	2.110.042.558,00	89,24	763.146.380,00
III	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.086.101.864,00	25.113.445.730,00	96,27	15.265.732.338,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.729.526.490,00	23.159.976.066,00	97,60	11.915.888.438,00
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	234.000.000,00	169.463.300,00	72,42	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Taman	141.000.000,00	140.986.856,00	99,99	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	448.541.200,00
6	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	289.689.998,00	289.541.000,00	99,95	176.000.000,00
7	Belanja Modal Pagar	1.541.885.376,00	1.353.478.508,00	87,78	2.229.222.700,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	496.080.000,00
IV	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	126.479.143.859,00	123.706.035.301,00	97,81	77.982.437.000,00
1	Belanja Modal Jalan Kota	73.883.233.225,00	71.922.363.490,00	97,35	16.242.132.330,00
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	27.693.220.548,00	27.285.300.299,00	98,53	59.165.785.770,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	200.000.000,00	199.142.100,00	99,57	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	16.385.120.000,00	16.357.602.200,00	99,83	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.349.575.736,00	3.304.858.762,00	98,66	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	700.010.000,00	698.978.500,00	99,85	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	74.895.300,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.932.600,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.267.984.350,00	3.937.789.950,00	92,26	1.671.053.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	28.638.000,00
V	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.256.861.366,00	3.142.566.846,00	96,49	4.725.057.227
1	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	410.460.000,00	409.936.000,00	99,87	62.485.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2	Belanja Modal Audio Visual	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	4.963.964,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	448.000.000,00	335.999.405,00	75,00	2.023.690.047,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.383.401.366,00	2.381.731.441,00	99,93	2.633.918.216,00
VI	Belanja Modal Aset Lainnya	149.525.000,00	114.410.000,00	76,52	0,00
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	149.525.000,00	114.410.000,00	76,52	0,00
	Jumlah	230.583.932.775,000	210.526.667.098,00	91,30	137.106.916.201,00

Pada TA 2023 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp230.583.932.775,00 dengan realisasi sebesar Rp210.526.667.098,00 atau 91,30% dari anggaran. Akumulasi realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp73.419.750.897,00 atau 53,54% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar Rp137.106.916.201,00. Kenaikan realisasi belanja terjadi pada realisasi Belanja Tanah sebesar Rp43.530.000,00; Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.272.989.585,00; Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.847.713.392,00; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp45.723.598.301,00, serta Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp114.410.000,00. Sementara terjadi penurunan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.582.490.381,00. Realisasi Belanja Modal dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan SKPD selama TA 2023.

3) Belanja Tak Terduga	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp7.138.545.104,00	Rp10.235.429.770,00

Realisasi belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam dan sosial, pengembalian atas kelebihan penerimaan, pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2023. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.888.025.106,00 dengan realisasi sebesar Rp7.138.545.104,00 atau 60,05 % dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.096.884.666,00 atau 43,38% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) pada TA 2022 sebesar Rp10.235.429.770,00.

Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2023 diperuntukkan untuk Bantuan Sosial Sosial yang tidak direncanakan Sebelumnya untuk Biaya Perawatan Rumah Sakit bagi keluarga tidak Mampu atas nama Hardizon dengan realisasi sebesar Rp25.554.104,00. Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2023 juga diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam yang sudah menjadi aset tetap tahun 2023 sebesar Rp7.098.561.000,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c. Surplus/Defisit

Tahun 2023
Rp48.973.056.559,35

Tahun 2022
Rp54.015.324.086,33

Pemerintah Kota Pematangsiantar menganggarkan defisit pada TA 2023 sebesar Rp153.605.614.944,00 namun realisasinya terdapat surplus anggaran sebesar Rp48.973.056.559,35 atau 31,88% dari rencana defisit yang dianggarkan.

d. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar, baik penerimaan ataupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Pematangsiantar untuk TA 2023 terdiri dari penggunaan SiLPA TA 2022, dengan uraian dalam tabel berikut.

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA tahun lalu	160.105.614.944,00	160.105.614.944,59	100,00	110.660.375.814,26
	Jumlah	160.105.614.944,00	160.105.614.944,59	100,00	110.660.375.814,26

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Kota Pematangsiantar untuk TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan Realisasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penyertaan modal (investasi)	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.570.084.956,00
	Jumlah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.570.084.956,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut dan sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada PDAM Tirtauli.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama TA 2023. Adapun SiLPA TA 2023 adalah sebesar Rp104.632.558.385,24.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp160.105.614.944,59	Rp110.660.375.814,26

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.105.614.944,59 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA TA 2023.

b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp104.632.558.385,24	Rp160.105.614.944,59

Berdasarkan defisit Anggaran sebesar Rp48.973.056.559,35 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp153.605.614.944,59 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp104.632.558.385,24. SiLPA Tahun 2023 tersebut berasal dari kurang anggaran pendapatan dan lebih anggaran penerimaan dikurangi dengan sisa anggaran belanja dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Kurang dari Anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp412.369.660,00;
- 2) Realisasi Kurang dari Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp14.673.621.150,00;
- 4) Realisasi Melebihi Anggaran Pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5.522.769.938,14 ;
- 5) Realisasi Melebihi Anggaran pendapatan transfer dana bagi hasil pajak sebesar Rp3.856.214.818,00;
- 6) Realisasi Kurang dari Anggaran Pendapatan Transfer DAU sebesar Rp317.264.822,00;
- 7) Realisasi Melebihi Anggaran Pendapatan Transfer DAK Fisik sebesar Rp5.597.805.432,00;
- 8) Realisasi Kurang Anggaran Pendapatan Transfer DAK Non Fisik sebesar Rp8.494.027.883,00 ;
- 10) Realisasi Kurang dari Anggaran Pendapatan Lainnya sebesar Rp378.168.891,00;
- 11) Realisasi Kurang dari Anggaran Pendapatan Hibah sebesar Rp606.000.000,00;
- 12) Realisasi Lebih dari Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebesar Rp184.781.112,00;
- 13) Sisa Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp41.649.905.240,00;
- 14) Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp47.794.794.417,51;
- 15) Sisa Anggaran Belanja Hibah/Subsidi sebesar Rp470.469.078,00;
- 16) Sisa Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp87.300,00;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- 17) Sisa Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp12.023.000.000,00;
- 18) Sisa Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.139.091.465,00;
- 19) Sisa Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp972.656.134,00;
- 20) Sisa Anggaran Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.773.108.558,00;
- 21) Sisa Anggaran Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp114.294.520,00;
Sisa Anggaran Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp35.115.000,00;
- 22) Sisa Anggaran Belanja tak terduga sebesar Rp4.749.480.002,00;

c. **Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp104.626.628.643,24 **Rp160.105.614.944,59**

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp104.626.628.643,24, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.18
Komposisi Pembentuk SAL Per 31 Desember 2023

No.	Uraian Komponen Pembentuk SAL Akhir/ SiLPA	Nilai per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Kas di Kas Daerah	95.165.398.243,63	Kas di BUD dan Kas di FKTP Puskesmas
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	
4	Kas di BLUD	6.969.637.761,83	
5	Kas di Bendahara BOS	14.106.068,78	
	Kas di Bendahara BOK	2.477.486.569,00	
	Jumlah	104.626.628.643,24	

3. Neraca

a. Aset Lancar

1) **Kas di Kas Daerah** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp95.165.432.715,63 **Rp138.577.388.389,92**

Jumlah tersebut merupakan saldo Buku Kas pada Kuasa BUD Kota Pematangsiantar dan FKTP Puskesmas per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Rincian Kas di Kas Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kas di BUD	93.897.304.802,63	135.658.157.291,92
1	Kas tunai di BUD	0,00	0,00
2	Rekening giro pada PT Bank Sumut Cabang Pematangsiantar		
	a. AC 01-02-003580-0	93.888.416.523,63	135.629.253.500,92
	b. AC 01-02-000002-0	8.888.279,00	28.903.791,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
II	Kas pada rekening JKN FKTP	1.268.127.913,00	2.919.231.098,00
1	Puskesmas Simarimbun	84.919.731,00	37.363.275,00
2	Puskesmas Bah Kapul	65.271.266,00	259.883.360,00
3	Puskesmas Kesatria	113.352.954,00	163.939.447,00
4	Puskesmas Tomuan	90.117.206,00	201.404.806,00
5	Puskesmas Parsoburan	84.674.042,00	45.389.347,00
6	Puskesmas Martimbang	33.669.531,00	19.363.800,00
7	Puskesmas Pardamean	73.551.771,00	67.655.885,00
8	Puskesmas Aek Nauli	59.916.049,00	119.049.281,00
9	Puskesmas Bah Biak	45.294.424,00	69.508.127,00
10	Puskesmas Kartini	56.990.434,00	87.986.399,00
11	Puskesmas Singosari	68.932.364,00	39.239.511,00
12	Puskesmas Raya	32.587.510,00	34.760.367,00
13	Puskesmas Karo	37.798.082,00	42.227.871,00
14	Puskesmas Martoba	125.214.035,00	466.203.566,00
15	Puskesmas Kahean	42.204.164,00	58.299.117,00
16	Puskesmas Bane	60.978.437,00	133.701.814,00
17	Puskesmas Gurilla	19.147.929,00	18.679.482,00
18	Puskesmas Rami	124.192.635,00	851.796.403,00
19	Puskesmas BP Nauli	49.317.349,00	202.779.240,00
	Jumlah I+II	95.165.432.715,63	138.577.388.389,92

Saldo pada rekening Kas Daerah AC 01-02-003580-0 sebesar Rp93.888.416.523,63 sudah termasuk di dalamnya saldo dana bos sebesar Rp18.573.550,57 pengembalian sisa dana akibat proses Regrouping. Pada AC 01-02-000002-0 terdapat perbedaan sebesar Rp5.322.000,00 yang terjadi akibat kesalahan kurang catat Bank Sumut atas pendapatan retribusi Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (PRKP) sebesar Rp2.520.000,00, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak sebesar Rp1.300.000,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp1.502.000,00 Atas kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan pada bulan Februari tahun 2024.

Terdapat perbedaan saldo yang dicatat dengan saldo pada rekening JKN FKTP sebesar Rp84.740,00 yang terdapat pada Puskesmas Raya sebesar Rp15.000,00, pada Puskesmas Martoba sebesar Rp19.740,00 dan sebesar Rp50.000,00 pada Puskesmas BP Nauli atas kesalahan transaksi Bank Sumut dan sudah dikembalikan ke rekening puskesmas pada tahun 2024.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp95.165.432.715,63 mengalami penurunan sebesar Rp43.411.955.674,29 atau 31,33% dari saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp138.577.388.389,92.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp0,00	Rp6.490.000,00

Per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada bendahara pengeluaran masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp6.490.000,00 atau 100%.

3) Kas Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp418.286.559,72	Rp1,842,638,995.83

Jumlah tersebut merupakan Kas *Outstanding* pada Bendahara pengeluaran yaitu kas atas belanja yang sudah diakui namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 ditambah dengan kas atas pengelolaan dana bergulir pada UPTD Dinas Koperasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Kas Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	5.928.600,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	1.066.100,00
3	BPKPD	4.976.100,00	963.000,00
4	BAPPEDA	3.822.100,00	0,00
5	UPTD Dinas Koperasi	409.488.359,72	1.834.681.295,83
Jumlah		418.286.559,72	1.842.638.995,83

Saldo kas per 31 Desember 2023 berupa kas *Outstanding* (belanja yang sudah diakui namun belum dilakukan pembayaran) senilai Rp4.976.100,00 terdapat pada BPKPD dan sebesar Rp3.822.100,00 pada BAPPEDA.

Saldo kas per 31 Desember 2023 berupa dana pengelolaan dana bergulir senilai Rp409.488.359,72 terdapat pada UPTD Dinas Koperasi, dimana sebesar Rp348.894.097,78 merupakan investasi dana bergulir yang sudah dikembalikan ke rekening UPTD Dinas Koperasi dan sebesar Rp60.594.261,94 merupakan pendapatan bunga dan denda dana bergulir pada UPTD Dinas Koperasi. Kas lainnya pada UPTD Dinas Koperasi dengan saldo sebesar Rp409.488.359,72 terdiri dari dua rekening, yaitu.

- Rekening Bank Sumut AC-01-03-033547-6 (Rekening Pokok) dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.225.836,78;
- Rekening Bank Sumut AC-01-03-033593-0 (Rekening Bunga) dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp58.262.522,94.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp418.286.559,72 mengalami penurunan sebesar Rp1.424.352.436,11 atau 77,30% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.842.638.995,83.

4) Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2023 Rp0,00	Tahun 2022 Rp10.921.000,00
---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada bendahara penerimaan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp10.921.000,00 atau 100%.

5) Kas di BLUD	Tahun 2023 Rp6.969.637.761,83	Tahun 2022 Rp21.472.230.945,83
-----------------------	--	---

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 yang masih berada di Kas BLUD RSUD Dr. Djasamen Saragih. Nilai tersebut merupakan hasil dari Penjumlahan Saldo awal sebesar Rp21.472.230.945,83 ditambah dengan penerimaan BLUD selama tahun 2023 sebesar Rp26.961.326.950,00 dan dikurangi dengan belanja BLUD tahun 2023 sebesar Rp41.463.920.134,00. Saldo Kas tersebut terdapat pada Bank BRI sebesar Rp6.969.637.761,83. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp14.502.593.184,00 atau 67,54%.

6) Kas di Bendahara BOS	Tahun 2023 Rp14.106.068,78	Tahun 2022 Rp38.584.608,84
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa dana BOS yang masih ada pada masing-masing bendahara BOS di SD dan SMP. Adapun sisa dana BOS dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.21

Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Jumlah Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank	Jumlah
1	SD	116	4.803.427,09	3.885.381,02	8.688.808,11
2	SMP	14	2.382.743,17	3.034.517,50	5.417.260,67
	Jumlah	130	7.186.170,26	6.919.898,52	14.106.068,78

Rincian pada **Lampiran 1**.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

7) **Kas di Bendahara BOK** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp2.483.381.839,00 **Rp0,00**

Kas di Bendahara BOK merupakan sisa dana BOK yang masih ada pada masing - masing bendahara BOK di Puskesmas. Adapun sisa dana BOK dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.22
Kas di Bendahara BOK Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Puskesmas Simarimbun	404.816.300,00	359.535.405,00	45.280.895,00
2	Puskesmas Bah Kapul	386.345.000,00	271.711.166,00	114.633.834,00
3	Puskesmas Kesatria	688.500.000,00	540.532.453,00	147.967.547,00
4	Puskesmas Tomuan	637.032.000,00	388.117.093,00	248.914.907,00
5	Puskesmas Parsoburan	469.800.000,00	317.368.084,00	152.431.916,00
6	Puskesmas Martimbang	264.987.100,00	185.242.405,00	79.744.695,00
7	Puskesmas Pardamean	347.262.000,00	251.890.592,00	95.371.408,00
8	Puskesmas Aek Nauli	244.922.300,00	205.309.542,00	39.612.758,00
9	Puskesmas Bah Biak	343.517.000,00	229.252.481,00	114.264.519,00
10	Puskesmas Kartini	526.253.000,00	417.821.083,00	108.431.917,00
11	Puskesmas Singosari	578.200.000,00	511.304.166,00	66.895.834,00
12	Puskesmas Raya	627.284.000,00	437.701.784,00	189.582.216,00
13	Puskesmas Karo	500.150.000,00	430.215.239,00	69.934.761,00
14	Puskesmas Martoba	747.987.000,00	593.391.920,00	154.595.080,00
15	Puskesmas Kahean	748.996.000,00	499.962.024,00	249.033.976,00
16	Puskesmas Bane	387.484.000,00	319.865.217,00	67.618.783,00
17	Puskesmas Gurilla	371.966.000,00	298.539.777,00	73.426.223,00
18	Puskesmas Rami	875.639.000,00	609.064.821,00	266.574.179,00
19	Puskesmas Bp Nauli	489.607.000,00	290.540.609,00	199.066.391,00
	Jumlah	9.640.747.700,00	7.157.365.861,00	2.483.381.839,00

8) **Piutang Pajak** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp46.286.044.008,47 **Rp42.728.699.824,47**

Piutang Pajak Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar Rp46.286.044.008,47 merupakan total dari Piutang Pajak tahun lalu ditambah dengan ketetapan tahun berjalan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 dikurangi dengan Piutang yang sudah dihapuskan / akan dihapuskan. Rincian pada **Lampiran 2**.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.23
Piutang Pajak Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	811.248.843,40	710.602.264,40
2	Pajak Restoran	2.041.116.302,00	1.719.107.845,00
3	Pajak Hiburan	120.574.600,00	111.312.950,00
4	Pajak Reklame	1.088.797.716,20	1.191.815.716,20
5	Pajak Galian Golongan C	3.260.000,00	3.260.000,00
6	Pajak Parkir	49.830.200,00	43.017.400,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	90.190.114,87	92.993.114,87
8	PBB	40.100.427.342,00	37.140.546.740,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	1.980.598.890,00	1.716.043.794,00
	Jumlah	46.286.044.008,47	42.728.699.824,47

Tunggakan pajak di atas termasuk tunggakan pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan pelimpahan Piutang PBB dari KPP Pratama, serta Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum untuk bulan Desember 2023, namun belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.286.044.008,47 mengalami kenaikan sebesar Rp3.557.344.184,00 atau 8,33% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.728.699.824,47.

9) **Piutang Retribusi** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp1.789.448.901,00 **Rp1.789.448.901,00**

Piutang Retribusi Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2023 sebesar Rp1.789.448.901,00 merupakan tunggakan Pendapatan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD namun belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Untuk tahun 2023 piutang retribusi tersebut terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar. Adapun rekapitulasi piutang tersebut dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.24
Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Retribusi	Piutang 31/12/2023 (Rp)	Piutang 31/12/2022 (Rp)
1	Retribusi Ijin Trayek	97.760.000,00	97.760.000,00
2	Retribusi parkir	1.100.500.000,00	1.100.500.000,00
3	Pengendalian Menara Telekomunikasi	591.188.901,00	591.188.901,00
	Jumlah	1.789.448.901,00	1.789.448.901,00

Rincian pada **Lampiran 3**.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.789.448.901,00 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.789.448.901,00.

10) Piutang Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
-----------------------------	-------------------	-------------------

Rp38.028.625.086,00

Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2023 sebesar Rp38.028.625.086,00 merupakan tunggakan Pendapatan Transfer atas bagi hasil pajak pusat sebesar Rp3.474.261.000,00 dan pendapatan transfer bagi hasil pajak Provinsi sebesar Rp34.554.364.086,00 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/164/KPTS/2024 tentang DBH 2023 serta Kurang Salur 2022.

11) Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2023	Tahun 2022
---------------------------------	-------------------	-------------------

Rp115.313.869,55

Rp74.833.333,33

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran untuk keperluan dalam tahun anggaran mendatang dan piutang atas pekerjaan yang belum dilaksanakan namun sudah dilakukan pembayaran. Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp115.313.869,55 terdiri dari :

1. Sewa kantor lurah Tanjung Pinggir pada Kecamatan Siantar Martoba sebesar Rp1.666.666,67;
2. Sewa rumah dinas Sekda pada Sekretariat Daerah sebesar Rp18.333.333,33;
3. Kelebihan pembayaran Rehabilitasi Jalan Marasi IV sebesar Rp30.289.054,50;
4. Kelebihan pembayaran Jalan Patuan Nagari (Lanjutan) sebesar Rp65.024.815,05.

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.313.869,55 mengalami kenaikan sebesar Rp40.480.536,22 atau 54,09% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.833.333,33.

12) Bagian Lancar TGR	Tahun 2023	Tahun 2022
------------------------------	-------------------	-------------------

Rp 16.513.300.006,89

Rp18.036.617.658,97

Bagian Lancar TGR sebesar Rp16.513.300.006,89 merupakan panjar kerja dan ketekoran kas yang terjadi Tahun 2002 s.d. 2020 yang sudah ada ketetapan pembebanannya namun belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya sampai dengan 31 Desember 2022 (sumber dari Matrix Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian per 16 Desember 2022) dengan rekapitulasi sebagai berikut.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.26
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023

No.	Tahun Kerugian	Jumlah Kerugian	Pembayaran/ Pelunasan	Sisa Kerugian
1	2002	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
2	2003	772.255.415,00	61.508.800,00	710.746.615,00
3	2004	1.536.742.275,00	20.095.375,00	1.516.646.900,00
4	2005	1.204.078.250,00	185.000.000,00	1.019.078.250,00
5	2006	13.502.400,00	5.626.000,00	7.876.400,00
6	2007	0,00	0,00	0,00
7	2008	304.476.200,00	277.140.000,00	27.336.200,00
8	2009	120.000.000,00	27.000.000,00	93.000.000,00
9	2010	1.177.606.200,00	1.025.507.300,00	152.098.900,00
10	2011	225.981.994,00	111.026.960,00	114.955.034,00
11	2012	591.170.009,59	591.170.009,59	0,00
12	2013	1.068.068.539,72	654.521.752,72	413.546.787,00
13	2014	616.952.971,53	616.952.971,53	0,00
14	2015	188.742.319,80	188.742.319,80	0,00
15	2016	815.652.449,16	600.652.449,16	215.000.000,00
16	2017	4.611.731.386,98	3.747.191.428,32	864.539.958,66
17	2018	7.968.670.387,77	2.610.015.838,83	5.358.654.548,94
18	2019	6.351.239.282,96	1.661.059.902,13	4.690.179.380,83
19	2020	2.051.925.952,87	752.284.920,41	1.299.641.032,46
	Jumlah	29.658.796.034,38	13.145.496.027,49	16.513.300.006,89

Jumlah saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.513.300.006,89 mengalami penurunan sebesar Rp1.523.317.652,08 atau 8,45% bila dibanding dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp18.036.617.658,97.

13) Piutang Lainnya

Tahun 2023
Rp24.091.892.548,58

Tahun 2022
Rp21.685.709.384,10

Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak dapat dikelompokkan ke akun Piutang pajak. Piutang Retribusi, maupun Piutang Transfer. Adapun piutang lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.27
Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Lainnya	2023	2022
1	Piutang TGR (Anggota DPRD)	1.800.158.000,00	1.800.158.000,00
2	Kerja Sama Daerah (BOT Ex Plaza Pantoan & GOR)	441.779.171,00	62.924.000,00
3	Piutang BLUD	3.348.616.463,00	2.186.052.850,00
4	Piutang Denda	18.501.338.914,58	16.950.883.816,50
5	Piutang Lain-Lain	0,00	685.690.717,60
	Total	24.091.892.548,58	21.685.709.384,10

Adapun piutang TGR merupakan Piutang anggota DPRD periode 2004-2010, yang berasal dari pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk TA 2006 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

yang kemudian dibatalkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, sehingga tunjangan tersebut harus dikembalikan, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.28
Piutang Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tunjangan Komunikasi Intensif	1.863.540.000,00
2	Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.608.000,00
	Sub Jumlah I	2.129.148.000,00
3	Pengembalian	
	a. Tahun 2007	123.000.000,00
	b. Tahun 2008	96.470.000,00
	c. Tahun 2009	109.520.000,00
	Sub Jumlah II	328.990.000,00
	Total (Sub Jumlah I – Sub Jumlah II)	1.800.158.000,00

Rincian pada **Lampiran 5**.

Menurut pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, seluruh piutang dari Anggota DPRD tersebut harus sudah disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Untuk penghitungan piutang BOT (jangka pendek) yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 dicatat sebesar Rp441.779.171,00 yaitu untuk mencatat penerimaan tahun 2024. Sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Pematangsiantar dengan PT. Inti Griya Prima Sakti Nomor : 09/PKS/2022 tentang optimalisasi tanah gedung eks Plaza Pantoan Jalan Dr. Sutomo kota Pematangsiantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS) sebesar Rp2.071.690.000,00 maka penerimaan 2024 adalah sebesar Rp238.425.000,00 dan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana Nomor : 032/043/V/Perj/Wk Thn 2019 tentang optimalisasi tanah Gedung Olah Raga kota Pematangsiantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS) sebesar Rp20.770.157.058,00 maka penerimaan 2024 adalah sebesar Rp203.354.171,00

Piutang pada BLUD RSUD Dr. Djasamen Saragih Tahun 2023 sebesar Rp3.348.616.463,00 terdiri dari Piutang Klaim Pasien BPJS sebesar Rp2.102.405.963,00; Piutang Klaim Pasien Dana Covid Rp1.155.621.800,00; Klaim Pasien BPJS Ketenagakerjaan Rp1.025.000,00; dan Piutang pemanfaatan kekayaan sebesar Rp89.563.700,00.

Piutang Denda sebesar Rp 18.501.338.914,64 merupakan Piutang Denda Pajak pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. (Rincian pada **Lampiran 4**).

Jumlah saldo aset lancar Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.091.892.548,64 mengalami kenaikan sebesar Rp2.406.183.164,54 atau 11,10% bila dibanding dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp21.685.709.384,10.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

14) Penyisihan Piutang **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp(50.014.238.821,29) **Rp(47,113,558,327.11)**

Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih diterapkan mulai TA 2015 berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar yang terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Saldo penyisihan piutang tak tertagih terdiri atas :

Tabel 5.25
Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Penyisihan 31 Des 2023	Penyisihan 31 Des 2022
1	Piutang Pajak	46.286.044.008,47	(31.900.003.505,86)	(29.901.225.829,12)
2	Piutang Retribusi	1.789.448.901,00	(1.789.448.901,00)	(1.789.448.901,00)
3	Piutang TGR	60.584.893.017,38	(302.924.465,09)	(306.861.038,89)
4	Piutang BLUD	3.348.616.463,00	(16.743.082,32)	(81.203.633,00)
5	Piutang Denda	18.510.715.723,58	(16.005.118.867,03)	(15.034.818.925,10)
Total		130.560.044.299,43	(50.014.238.821,29)	(47.113.558.327,11)

15) Persediaan **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp22.556.769.596,47 **Rp14.944.676.929,69**

Persediaan Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.556.769.596,47 berupa barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pematangsiantar dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.29
Persediaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	115.645.163,00	280.944.588,00
2	Bahan Kimia	67.345.291,00	337.963.944,00
3	Bahan-bahan lainnya	679.238.217,00	1.233.464.466,00
4	ATK	681.035.843,00	375.246.233,00
5	Kertas & Cover	44.149.080,00	25.616.161,00
6	Bahan Cetak	614.326.005,00	533.113.321,00
7	Benda Pos	579.950,00	270.000,00
8	Bahan Komputer	1.304.050,00	188.700,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00
10	Alat Listrik	2.087.887.762,00	1.661.681.981,00
11	Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	304.720.604,00	25.420.615,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

12	Obat-obatan	8.093.245.748,47	10.256.807.603,69
13	Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00
14	Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	32.563.750,00	33.873.550,00
15	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9.832.028.133,00	0,00
15	Natura dan Pakan-Natura	2.700.000,00	0,00
16	Pakan	0,00	3.854.000,00
17	Komponen-Komponen Lainnya	0,00	176.231.767,00
	Jumlah	22.556.769.596,47	14.944.676.929,69

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.556.769.596,47 mengalami kenaikan sebesar Rp7.612.092.666,78 atau 50,94% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.944.676.929,69. Rincian pada **Lampiran 9**.

Selain saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.556.769.596,47 yang telah disajikan dalam Neraca, terdapat persediaan yang telah dikeluarkan dari pencatatan neraca berupa persediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang telah kadaluwarsa dan/atau rusak senilai Rp618.598.876,53, yang terdiri atas persediaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp478.252.084,70 ditambah persediaan pada puskesmas senilai Rp60.009.250,84 dan RSUD dr. Djasamen Saragih senilai Rp80.337.541,00. Saldo persediaan kadaluwarsa dan/atau rusak tersebut merupakan saldo akumulasi dari sebelum tahun 2010, yang s.d. 31 Desember 2023 belum dimusnahkan.

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Non Permanen

Tahun 2023
Rp4.496.835.734,51

Tahun 2022
Rp5.134.812.312,22

Pengelolaan dana bergulir diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jumlah Investasi Dana Bergulir yang dikelola pada UPTD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sampai dengan 31 desember 2023 sebesar Rp8.500.000.000,00 yang digulirkan secara bertahap, yaitu :

- (a) Tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- (b) Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- (c) Tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- (d) Tahun 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
- (e) Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Untuk guliran Tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp951.958.990,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.548.041.010,00. Untuk pengembalian dana bergulir yang digulirkan Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 ditampung pada rekening yang dikelola oleh UPTD Dinas Koperasi dan UMKM.

Atas saldo sebesar Rp7.548.041.010,00 masih terdapat pada rekening kas UPTD Dinas Koperasi sebesar Rp348.898.244,78 dan dicatat sebagai kas lainnya,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

sedangkan yang digulirkan sebesar Rp7.199.146.912,22 dicatat sebagai investasi non permanen lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Guliran 2012 sebesar Rp48.041.010,00;
- Guliran 2013 sebesar Rp319.486.106,00;
- Guliran 2014 sebesar Rp686.416.677,00;
- Guliran 2015 sebesar Rp261.388.877,00;
- Guliran 2015 yang digulirkan kembali sebesar Rp703.472.211,00;
- Guliran 2016 sebesar Rp427.777.755,00;
- Guliran 2016 yang digulirkan kembali sebesar Rp287.805.553,00;
- Guliran 2019 yang digulirkan kembali sebesar Rp776.943.445,00;
- Guliran 2020 yang digulirkan kembali sebesar Rp524.856.437,00;
- Guliran 2021 yang digulirkan kembali sebesar Rp229.980.770,00;
- Guliran 2022 tahap I sebesar Rp311.846.003,00;
- Guliran 2022 tahap II sebesar Rp589.215.973,00;
- Guliran 2022 tahap III sebesar Rp711.916.095,22;
- Guliran 2023 tahap I Rp700.000.000,00;
- Guliran 2023 tahap II Rp620.000.000,00.

Rincian penjelasan saldo Investasi Non Permanen-Dana Bergulir tersebut sebagai berikut.

	Rp
Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023	7.548.041.010,00
Reklas ke Kas Lainnya atas nilai yang belum digulirkan (masih terdapat di rekening kas UPTD Diskop)	(348.894.097,78)
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023	(2.702.311.177,71)
Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 secara NRV	4.496.835.734,51

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp2.702.311.177,71 diperoleh dengan melakukan perhitungan kualitas investasi dengan perhitungan pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023

TAHUN	INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA	PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA				JUMLAH
		LANCAR	KURANG	DIRAGUKAN	MACET	
		0,50%	10%	50%	100%	
2012	48.041.010,00	240.205,05	-	-	-	240.205,05
2013	319.486.106,00	-	-	-	319.486.106,00	319.486.106,00
2014	686.416.677,00	-	-	-	686.416.677,00	686.416.677,00
2015.1	261.388.877,00	-	-	-	261.388.877,00	261.388.877,00
2015.2	703.472.211,00	-	-	-	703.472.211,00	703.472.211,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

2016.1	427.777.755,00	-	-	-	427.777.755,00	427.777.755,00
2016.2	287.805.553,00	-	-	-	287.805.553,00	287.805.553,00
2019	776.943.445,00	3.884.717,23	-	-	-	3.884.717,23
2020	524.856.437,00	2.624.282,19	-	-	-	2.624.282,19
2021	229.980.770,00	1.149.903,90	-	-	-	1.149.903,90
2022,1	311.846.003,00	1.559.230,02	-	-	-	1.559.230,02
2022,2	589.215.973,00	2.946.079,86	-	-	-	2.946.079,86
2022,3	711.916.095,22	3.559.580,48	-	-	-	3.559.580,48
2023,1	700.000.000,00	-	-	-	-	-
2023,2	620.000.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL...	7.199.146.912,22	15.963.998,71	-	-	2.686.347.179,00	2.702.311.177,71

2) Investasi Permanen

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp499.172.088.045,00

Rp490.813.403.712,00

Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp499.363.212.413,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada:

a. PT Bank Sumut	Rp	46.644.281.637,00
b. Perumda Tirta Uli	Rp	64.756.330.882,00
c. PD Pasar dan Horas Jaya	Rp	357.460.914.925,00
d. PD Pembangunan dan Aneka Usaha	Rp	30.310.560.601,00
Jumlah	Rp	499.172.088.045,00

Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Kota Pematangsiantar di PT. Bank Sumut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.644.281.637,00. Nilai penyertaan tersebut merupakan penjumlahan dari saldo tahun lalu sebesar Rp41.644.281.637,00 ditambah dengan penambahan penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 07.16/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/06/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Perumda Tirta Uli per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.016.498.417,00 dengan rincian:

Tabel 5.31
Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Uli

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal dasar berdasarkan Perda No. 3 Tahun 1986 Pasal 7 Ayat 1	476.140.673,00
2	Koreksi pengurangan penyertaan modal berdasarkan SK Walikota No. 694.2/607/Perek/1989 tanggal 21 Maret 1989	(41.649.197,00)
3	Penerusan hibah barang eks proyek dari Kementerian Keuangan Tahun 1997 dan 1998	2.215.798.841,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Penyertaan modal berdasarkan SP2D No. 2048/SP2D-LS/III/2011 tanggal 23 Agustus 2011	1.000.000.000,00
5	Pemasangan tujuh jaringan pipa transmisi Tahun 2012 dan 2013 (BAST pengelolaan pada tanggal 1 September 2014)	9.459.126.000,00
6	Pemasangan Tahun 1999, 2000, dan 2007	3.385.132.100,00
7	Penyertaan Modal Non Kas berdasarkan SP2D No. 10060/SP2D-LS/1.20.05.01/XII/2016	48.821.950.000,00
8	Penyertaan Modal berdasarkan SP2D No. 02553/SP2D-LS/4.04.2.1/VI/2019	6.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal berdasarkan SP2D No. 03033/SP2D-LS/4.04.2.1/VI/2020	1.500.000.000,00
10	Penyertaan Modal berdasarkan SP2D No. 02501/SP2D-LS/4.4.1.1/VI/2021	5.200.000.000,00
11	Penyertaan Modal berdasarkan SP2D No.07.16/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/04/2022	1.500.000.000,00
12	Penyertaan Modal berdasarkan SP2D No.07.16/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/07/2023	1.500.000.000,00
Jumlah		81.016.498.417,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Perumda Tirta Uli menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Tirta Uli sampai dengan Tahun 2023 masih berakumulasi rugi senilai Rp16.260.167.535,00 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah, sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtauli dinyatakan sebesar Rp64.756.330.882,00 (Rp81.016.498.417,00 - Rp16.260.167.535,00).

Tabel 5.32
Rincian Akumulasi Laba/(Rugi) Perumda Tirta Uli

Uraian	Lab/(Rugi)
Akumulasi Laba (rugi) s/d tahun 2009	(33.990.622.204,00)
Koreksi tahun 2009	6.062.251.541,00
Laba (rugi) tahun 2010	870.023.845,00
Laba (rugi) tahun 2011	249.919.317,00
Koreksi tahun 2011	(1.119.943.160,00)
Laba tahun 2013	1.151.876.972,00
Laba tahun 2014	2.705.105.908,00
Laba tahun 2015	1.029.145.745,00
Laba tahun 2016	102.916.608,00
Laba tahun 2017	142.650.904,00
Laba tahun 2018	210.007.572,00
Laba Tahun 2019	539.728.514,00
Laba Tahun 2020	1.038.899.525,00
Laba Tahun 2021	1.468.222.704,00
Dividen Tahun Buku 2021 yang dibagikan tahun 2022	(500.000.000,00)
Laba Tahun 2022	1.778.598.196,00
Laba Tahun 2023	2.001.050.478,00
Akumulasi	(16.260.167.535,00)

Penyertaan modal kepada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp60.093.386.000,00, dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- SP2D Nomor 5438/SP2D-LS/XII/2014	Rp	4.000.000.000,00
- SP2D Nomor 0724/SP2D-LS/1.20.05.01/III/2015	Rp	5.000.000.000,00
- SP2D Nomor 1372/SP2D-LS/1.20.05.01/V/2016	Rp	2.000.000.000,00
- SP2D Nomor 0571/SP2D-LS/4.04.2.1/III/2017	Rp	3.500.000.000,00
- SP2D Nomor 10649/SP2D-LS/4.04.2.1/XII/2018	Rp	160.000.000,00
- SP2D Nomor 03410/SP2D-LS/4.04.2.1/VI/2019	Rp	2.000.000.000,00
Sub Jumlah	Rp	16.660.000.000,00
- Berita Acara Nomor 032/1090/II/2015	Rp	12.265.409.000,00
- Berita Acara Nomor 032/1091/II/2015	Rp	3.752.899.000,00
- Berita Acara Nomor 032/3031/V/2015	Rp	1.857.527.000,00
- Berita Acara Nomor 032/3032/V/2015	Rp	22.879.236.000,00
- Berita Acara Nomor 032/6355/XII/2018	Rp	2.678.315.000,00
Sub Jumlah		43.433.386.000,00
Jumlah	Rp	60.093.386.000,00

Berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pembangunan & Aneka Usaha sampai dengan Tahun 2023 masih berakumulasi rugi senilai Rp29.782.825.399,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Rugi tahun 2014	Rp	(2.991.639.767,00)
- Rugi tahun 2015	Rp	(11.068.672.355,00)
- Rugi tahun 2016	Rp	(4.481.387.980,00)
- Rugi tahun 2017	Rp	(9.966.792.187,00)
- Rugi tahun 2018	Rp	(7.528.920,00)
- Rugi tahun 2019	Rp	(556.542.846,00)
- Rugi tahun 2020	Rp	(435.139.386,00)
- Rugi tahun 2021	Rp	(299.235.410,00)
- Laba tahun 2022	Rp	11.366.740,00
- Laba tahun 2023	Rp	12.746.712,00
Jumlah	Rp	(29.782.825.399,00)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar pada PD. Pembangunan & Aneka Usaha menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai penyertaan modal dicatat sebesar Rp30.310.560.601,00 (Rp60.093.386.000,00 – Rp29.782.825.399,00). Penyertaan modal kepada PD. Pembangunan & Aneka Usaha didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Penyertaan modal kepada PD. Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp369.577.189.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D No. 1891/SP2D-LS/1.20.05.02/VI/2015	Rp	4.000.000.000,00
- SP2D No. 2366/SP2D-LS/1.20.05.01/VI/2016	Rp	3.000.000.000,00
- SP2D No. 0914/SP2D-LS/4.04.2.1/IV/2017	Rp	1.500.000.000,00
- SP2D No. 11297/SP2D-LS/4.04.2.1/XII/2019	Rp	2.000.000.000,00
Sub Jumlah		10.500.000.000,00
- Piutang Dinas Pasar Per 31 Desember 2014	Rp	1.088.026.477,00
- Berita Acara Nomor 030/8196/XII/2015	Rp	350.267.436.000,00
- Berita Acara Nomor 032/6354/XII/2018	Rp	1.849.332.289,00
- Berita Acara Nomor 032/6361/XII/2018	Rp	1.151.829.000,00
- Berita Acara Nomor 028/5550/XI/2021	Rp	4.720.565.955,00
Sub Jumlah		359.077.189.721,00
Jumlah	Rp	369.577.189.721,00

Berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pasar Horas Jaya sampai dengan Tahun 2023 masih berakumulasi rugi senilai Rp12.116.274.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Rugi tahun 2015	Rp	(3.433.866.339,00)
- Rugi tahun 2016	Rp	(2.880.668.331,00)
- Rugi tahun 2017	Rp	(1.639.994.003,00)
- Rugi tahun 2018	Rp	(1.746.208.679,00)
- Rugi tahun 2019	Rp	(682.102.899,00)
- Rugi tahun 2020	Rp	(1.421.479.451,00)
- Laba tahun 2021	Rp	1.103.886,00
- Rugi tahun 2022	Rp	(157.946.123,00)
- Rugi tahun 2023	Rp	(155.112.857,00)
Jumlah	Rp	(12.116.274.796,00)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar pada PD. Pasar Horas Jaya menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai penyertaan modal dicatat sebesar Rp357.460.914.925,00 (Rp369.577.189.721,00-Rp 12.116.274.796,00).

Saldo Investasi Permanen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp499.172.088.045,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.358.684.333,00 atau 1,70% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp490.813.403.712,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c. **Aset Tetap** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp3.756.910.141.434,24 **Rp3.781.381.013.209,19**

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.756.910.141.434,24. Nilai ini merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023 ditambah Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi, Dana Non APBD, Hibah, dan penilaian ulang dikurangi dengan penghapusan, penyerahan kepada pihak ketiga, reklasifikasi, dan kapitalisasi selama Tahun 2023. Atas nilai aset tersebut kemudian dikurangi dengan dampak kebijakan kapitalisasi aset tetap yang disajikan dalam ekstrakompatabel sebesar Rp43.744.032.303,00 dan aset tetap kondisi rusak berat sebesar Rp213.092.557.976,88.

Tabel 5.33
Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Tanah	2.407.593.421.035,75	2.415.411.620.035,75
2	Peralatan dan Mesin	458.522.182.397,22	417.701.442.757,22
3	Gedung dan Bangunan	582.046.346.520,60	557.369.315.794,44
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	1.768.622.043.876,41	1.641.184.864.660,47
5	Aset Tetap Lainnya	53.339.278.354,00	48.819.044.350,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.749.691.082,41	23.094.780.216,75
7	Akumulasi Penyusutan	(1.527.962.821.832,15)	(1.322.200.054.605,44)
	Jumlah	3.756.910.141.434,24	3.781.381.013.209,19

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.756.910.141.434,24 mengalami penurunan sebesar Rp24.470.871.774,95 atau 0,65% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.781.381.013.209,19. Rincian pada **Lampiran 10**.

1) **Tanah** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp2.407.593.421.035,75 **Rp2.415.411.620.035,75**

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 dicatat senilai Rp2.407.593.421.035,75. Tanah per 31 Desember 2023 terdiri dari 2.852 bidang tanah seluas 4.539.679,78m² terdiri dari 2.527 bidang tanah dibawah jalan seluas 3.480.128,16 m², tanah bangunan gedung 227 bidang seluas 1.006.700 m² dan 98 bidang tanah dibawah irigasi seluas 52.851,62 m² dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Tanah bangunan gedung yang telah bersertifikat sebanyak 204 bidang.
- b) Tanah bangunan gedung yang belum bersertifikat sebanyak 23 bidang.
- c) Dari 2.527 bidang untuk tanah jalan, yang sudah bersertifikat sebanyak 994 Bidang jalan.
- d) Dari 2.527 bidang untuk tanah jalan, yang belum bersertifikat sebanyak 1.533 Bidang jalan.

Tanah yang telah bersertifikat memiliki rincian bidang dan luas dengan uraian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.34
Rincian Aset Tetap Tanah Bangunan Gedung Bersertifikat

No.	Lokasi	Bidang	Luas
1	Kecamatan Siantar Marihat	21 Bidang	51.351 M ²
2	Kecamatan Siantar Marimbun	17 Bidang	27.549,00 M ²
3	Kecamatan Siantar Selatan	20 Bidang	207.293 M ²
4	Kecamatan Siantar Barat	41 Bidang	136.144 M ²
5	Kecamatan Siantar Utara	23 Bidang	77.575 M ²
6	Kecamatan Siantar Timur	26 Bidang	94.698 M ²
7	Kecamatan Siantar Martoba	25 Bidang	100.565 M ²
8	Kecamatan Siantar Sitalasari	31 Bidang	140.538 M ²
	Jumlah	204 Bidang	835.713 M ²

Tabel 5.35
Rincian Aset Tetap Tanah Dibawah Jalan Bersertifikat

No.	Lokasi	Bidang	Luas
1	Kecamatan Siantar Marihat	83 Bidang	72.878,00 M ²
2	Kecamatan Siantar Marimbun	290 Bidang	179.786,00 M ²
3	Kecamatan Siantar Selatan	89 Bidang	151.481,00 M ²
4	Kecamatan Siantar Barat	255 Bidang	329.640,00 M ²
5	Kecamatan Siantar Utara	- Bidang	- M ²
6	Kecamatan Siantar Timur	85 Bidang	83.903,00 M ²
7	Kecamatan Siantar Martoba	1 Bidang	483,00 M ²
8	Kecamatan Siantar Sitalasari	191 Bidang	90.630,00 M ²
	Jumlah	994 Bidang	908.801,00 M ²

Pada Tahun 2023 terdapat mutasi aset tetap tanah sebesar Rp7.818.199.000,00 yang terdiri dari :

- Mutasi tambah aset Tanah Tempat Pemakaman Umum Jalan Parsaoran Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari senilai Rp5.122.925.332,00;
- Mutasi tambah aset tanah Tempat Pemrosesan Akhir Jalan Rondahaim Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba senilai Rp4.292.875.668,00;
- Mutasi kurang aset tanah Gedung Olah Raga Kota Pematangsiantar yang digunausahakan kepada pihak ketiga yakni PT. Suriatama Mahkota Kencana Nomor : 032/043/V/Perj/Wk Thn 2019 tentang optimalisasi tanah Gedung Olah Raga kota Pematangsiantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS) senilai Rp17.234.000.000,00.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp2.407.593.421.035,75 mengalami penurunan sebesar Rp7.818.199.000,00 atau 00,32% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022.

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2023 **Tahun 2022**
Rp458.522.182.397,22 **Rp417.701.442.757,22**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 senilai Rp458.522.182.397,22 yang terdiri atas.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.36
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

No.	Peralatan dan Mesin	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Alat Besar	20.481.380.188,00	20.223.561.688,00
2	Alat Angkutan	74.401.920.402,00	74.258.417.544,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.400.185.149,91	2.409.417.874,91
4	Alat Pertanian	2.081.516.180,00	2.042.396.180,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	88.932.564.538,55	73.110.405.313,55
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.215.682.871,00	11.544.014.490,00
7	Alat-alat Kedokteran	143.079.225.152,00	128.917.581.147,00
8	Alat Laboratorium	38.800.323.710,76	36.220.742.503,76
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	521.209.259,00	358.614.260,00
10	Komputer	65.153.172.953,00	56.149.857.261,00
11	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	7.500.000,00	7.500.000,00
12	Alat Keselamatan Kerja	813.203.248,00	472.339.750,00
13	Alat Peraga	31.482.000,00	31.482.000,00
14	Peralatan Proses/Produksi	2.757.570.200,00	2.751.670.200,00
15	Rambu – Rambu	8.480.126.475,00	8.843.962.475,00
16	Peralatan Olah Raga	365.120.070,00	359.480.070,00
	Jumlah	458.522.182.397,22	417.701.442.757,22

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 (termasuk aset ekstrakomptabel dan rusak berat) 461.626.810.719,22

Mutasi tambah:

a) Belanja Modal Tahun 2023	49.273.209.221,00	
b) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	4.707.154.506,00	
c) Reklas dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	0,00	
d) APBN / Hibah	13.400.000,00	
e) Pindah dari KIB Lain Berasal dari Belanja Modal 2023	14.900.000,00	
f) Inventarisasi/Koreksi	0,00	
g) Reklas dari KIB lain	0,00	
h) Aset Mutasi/Pindah masuk	7.138.490.515,00	
i) Aset dari hutang 2023	14.350.000,00	
Jumlah		61.161.504.242,00

Mutasi kurang:

a) Penghapusan Tahun 2023	8.146.734.941,00
b) Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	827.330.479,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c) Dari Belanja Modal 2023 Pindah Ke KIB Lain	130.450.000,00	
d) Inventarisasi/Koreksi	0,00	
e) Aset Mutasi/Pindah keluar	7.138.490.515,00	
Jumlah		16.243.005.935,00

Saldo per 31 Desember 2023 (termasuk aset ekstrakomptabel dan rusak berat) 506.545.309.026,22

Pada tahun 2023 terdapat penambahan aset yang berasal dari hibah CSR Bank Indonesia Tahun 2023 kepada Kecamatan Siantar Barat yang dicatat pada Buku Inventaris senilai Rp13.400.000,00 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berupa 2 unit sepeda motor roda dua.

Nilai aset peralatan dan mesin tersebut selanjutnya masih dikurangi dengan nilai aset barang kondisi rusak berat senilai Rp6.773.864.903,00 dan ekstrakomptabel senilai Rp40.978.423.453,00 serta aset yang direklas ke aset lainnya senilai Rp270.838.273,00, sehingga nilai aset tetap peralatan dan mesin dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp458.522.182.397,22 (Rp506.545.309.026,22 - Rp6.773.864.903,00 - Rp40.978.423.453,00 - Rp270.838.273,00).

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp458.522.182.397,22 mengalami peningkatan senilai Rp40.820.739.640,00 atau 9,77% bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp417.701.442.757,22.

3) Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp582.046.346.520,60	Rp557.369.315.794,44

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 senilai Rp582.046.346.520,60 yang terdiri atas :

Tabel 5.37
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Bangunan gedung	553.540.597.971,40	531.070.313.808,24
2	Bangunan monument	3.616.652.392,00	3.616.652.392,00
3	Bangunan Menara	1.596.837.000,00	1.596.837.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	23.292.259.157,20	21.085.512.594,20
	Jumlah	582.046.346.520,60	557.369.315.794,44



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 (termasuk aset ekstrakomptabel dan rusak berat)		561.868.227.928,44
Mutasi tambah:		
a) Belanja Modal Tahun 2023	25.113.445.730,00	
b) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	5.806.951.672,54	
c) Reklas dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	0,00	
d) APBN / Hibah	0,00	
e) Pindah dari KIB Lain Berasal dari Belanja Modal 2023	366.499.405,00	
f) Inventarisasi/Koreksi	0,00	
g) Reklasifikasi (Pindah dari KIB Lain)	188.487.274,62	
h) Mutasi pindah masuk	18.752.714.621,00	
i) Aset dari hutang 2023	70.376.150,00	
Jumlah		50.298.474.853,16
Mutasi kurang:		
a) Penghapusan Tahun 2023	488.470.667,00	
b) Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	228.610.700,00	
c) Dari Belanja Modal 2023 Pindah Ke KIB Lain	5.729.361.622,58	
d) Mutasi pindah keluar	18.752.714.621,00	
e) Reklas Pindah ke KIB lain	0,00	
f) Koreksi	0,42	
Jumlah		25.199.157.611,00
Saldo per 31 Desember 2023		586.967.545.170,60

Nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp586.967.545.170,60 tersebut selanjutnya masih dikurangi dengan nilai aset barang kondisi rusak berat senilai Rp2.155.589.800,00 dan ekstrakomptabel senilai Rp2.765.608.850,00 sehingga nilai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp582.046.346.520,60 (Rp586.967.545.170,60 - Rp2.155.589.800,00 - Rp2.765.608.850,00)

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp 557.369.315.794,44 tersebut tidak termasuk didalamnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah seluas 4.914 m² sebanyak 33 unit senilai Rp5.416.790.000,00. Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut adalah Taman Hewan Pematangsiantar yang telah digunakannya kepada pihak ketiga yakni PT Uni Twin Indonesia Medan. sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 1996 antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan PT Unitwin Indonesia Medan yang beralamat di Jl. Pepaya No. 26 Medan dengan jangka waktu penggunakannya selama 30 tahun. Aset tetap tersebut telah direklasifikasi pencatatannya ke aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp582.046.346.520,60 mengalami peningkatan senilai Rp24.677.030.726,16 atau 4,43% bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp557.369.315.794,44.

4) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp1.768.622.043.876,41 **Rp1.641.184.864.660,47**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 senilai Rp1.768.622.043.876,41. Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai namun tidak termasuk nilai tanahnya, yang terdiri atas:

Tabel 5.38
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

No.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Jalan dan jembatan	1.076.112.354.200,31	1.024.194.423.054,82
2	Bangunan air dan irigasi	594.837.837.889,82	524.188.887.773,37
3	Instalasi	15.840.485.197,64	15.840.485.197,64
4	Jaringan	81.831.366.588,64	76.961.068.634,64
	Jumlah	Rp1.768.622.043.876,41	Rp1.641.184.864.660,47

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		1.844.253.029.227,35
Mutasi tambah:		
a) Belanja Modal Tahun 2023	123.706.035.301,00	
b) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	5.908.834.843,42	
e) Reklas dari BTT	7.098.561.000,00	
f) Aset dari Hutang 2023	427.227.486,16	
g) Aset dari Piutang 2022	0,00	
h) Pindah dari KIB Lain Berasal dari Belanja Modal 2023	5.829.311.622,58	
i) Inventarisasi/Koreksi	10.073.171.759,81	
k) Reklasifikasi (Pindah dari KIB Lain)	9.727.335.334,23	
l) Mutasi pindah masuk antar SKPD	0,00	
m) Aset dari Hibah	0,00	
Jumlah		162.770.477.347,20
Mutasi kurang:		
a) Penghapusan Tahun 2023	0,00	
b) Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	23.689.392.897,94	



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c) Dari Belanja Modal 2023 Pindah Ke KIB Lain	1.570.733.474,51	
d) Mutasi pindah keluar antar SKPD	0,00	
e) Reklasifikasi (Pindah ke KIB Lain)	0,00	
f) Inventarisasi/Koreksi	10.073.171.758,81	
Jumlah		35.333.298.131,26
Saldo per 31 Desember 2023 (termasuk aset rusak berat)		1.971.690.208.443,29

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut selanjutnya masih dikurangi dengan nilai aset barang kondisi rusak berat senilai Rp203.068.164.566,88, sehingga nilai aset tetap jalan, dan jaringan dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.768.622.043.876,41 (Rp1.971.690.208.443,29 - Rp203.068.164.566,88)

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.768.622.043.876,41 mengalami kenaikan senilai Rp127.437.179.215,94 atau 7,76% bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp1.641.184.864.660,47.

5) **Aset Tetap Lainnya** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp53.339.278.354,00 **Rp48.819.044.350,00**

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Pematangsiantar per 31 Desember 2023 senilai Rp53.339.278.354,00. Jumlah Aset Tetap Lainnya tersebut merupakan nilai perolehan yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam Aset Tetap sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang terdiri atas:

Tabel 5.39
Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Aset Tetap Lainnya	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Buku perpustakaan	51.803.018.987,00	47.287.384.983,00
2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	397.050.372,00	392.450.372,00
3	Hewan	0,00	0,00
4	Biota Perairan	72.686.795,00	72.686.795,00
5	Tanaman	1.066.522.200,00	1.066.522.200,00
6	Barang Koleksi non Budaya	0,00	0,00
7	Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00
	Jumlah	Rp53.339.278.354,00	Rp48.819.044.350,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :
Saldo per 31 Desember 2022 (termasuk aset rusak berat) 49.947.991.057,00
Mutasi tambah:

a) Belanja Modal Tahun 2023	3.142.566.846,00
b) Pindah dari KIB Lain Berasal dari Belanja Modal 2023	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c) Belanja Barang Jasa	2.158.030.000,00	
Jumlah		5.300.596.846,00
Mutasi kurang:		
a) Penghapusan Tahun 2023	463.471.437,00	
b) Koreksi/Pindah KIB Lain	0,00	
c) Dari Belanja Modal 2023 Pindah Ke KIB Lain	350.899.405,00	
Jumlah		814.370.842,00
Saldo per 31 Desember 2023 (termasuk aset rusak berat)		54.434.217.061,00

Nilai aset tetap lainnya tersebut selanjutnya masih dikurangi dengan nilai aset barang kondisi rusak berat Rp1.094.938.707,00 sehingga nilai aset tetap lainnya dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp53.339.278.354,00 (Rp54.434.217.061,00 - Rp1.094.938.707,00).

Aset Tetap Lainnya senilai Rp53.339.278.354,00 tersebut termasuk di dalamnya nilai perolehan hewan dan tanaman senilai Rp231.650.000,00. Aset Tetap Lainnya tersebut merupakan hewan dan tanaman yang telah diserahkan dan digunakannya oleh pihak ketiga yakni PT. Unitwin Indonesia Medan. sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 1996 antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan PT Unitwin Indonesia Medan yang beralamat di Jl. Pepaya No. 26 Medan dengan jangka waktu pengunaannya selama 30 tahun. Aset tetap tersebut telah direklasifikasi pencatatannya ke aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.339.278.354,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.520.234.004,00 atau 9,26% bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp48.819.044.350,00.

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp14.749.691.082,41 **Rp23.094.780.216,75**

Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp14.749.691.082,41 terdiri atas:

Tabel 5.40
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun	KDP (Rp)	Ket.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2012 - 2023	13.941.819.378,41	
2	Satuan Polisi dan Pamong Praja	2017	143.264.000,00	
3	Dinas Kesehatan	2017	215.215.000,00	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2020 - 2023	379.399.704,00	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2019	69.993.000,00	
Jumlah			14.749.691.082,41	



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Dinas PUTR terdapat satu paket proyek Tahun 2012 senilai Rp398.772.000,00 yang belum dilunasi merupakan perencanaan data base sistem jaringan drainase Kota Pematangsiantar. Satu paket proyek Tahun 2012 senilai Rp739.936.000,00 yang sudah dilunasi merupakan penyusunan DED *outer ring road* Pematangsiantar melalui dua kali pembayaran yaitu pada Tahun 2012 senilai Rp665.942.400,00 dan pada Tahun 2014 senilai Rp73.993.600,00. namun masih tetap dicatatkan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan dikarenakan pekerjaan tersebut dinyatakan belum selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Rincian pekerjaan fisik yang merupakan KDP dan yang belum dibayar lunas pada **Lampiran 11**.

Mutasi KDP selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		23.094.780.216,750
Mutasi tambah:		
a) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa		0,00
b) Aset dari Hutang 2023		0,00
c) Reklas dari BTT Covid		0,00
d) Pindah dari KIB Lain Berasal dari Belanja Modal 2023	1.570.733.474,51	
e) Pindah dari KIB Lain		0,00
Jumlah		1.570.733.474,51
Mutasi kurang:		
a) Kapitalisasi/reklasifikasi (Pindah ke KIB Lain)	9.915.822.608,85	
Jumlah		9.915.822.608,85
Saldo per 31 Desember 2023		14.749.691.082,41

7) **Akumulasi Penyusutan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp1.527.962.821.832,15 Rp1.322.200.054.605,44

Seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.41
Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Peny. s.d 31 Desember 2022	Koreksi Tambah (Kurang)	Akumulasi Peny. s.d 1 Januari 2023	beban peny. 2023	Akumulasi peny. s.d 2023
Peralatan dan Mesin	287.889.672.749,55	(11.479.247.818,00)	276.410.424.931,55	39.675.300.760,00	316.085.725.691,55
Bangunan dan Gedung	186.819.380.182,29	(9.004.089.338,00)	177.815.290.844,29	34.055.984.227,77	211.871.275.072,06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	847.491.001.673,60	(2.977.654.439,54)	844.513.347.234,06	155.492.473.834,48	1.000.005.821.068,54
Jumlah	1.322.200.054.605,44	(23.460.991.595,54)	1.298.739.063.009,90	229.223.758.822,25	1.527.962.821.832,15



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

d. Aset Lainnya

1) Piutang BOT (Jangka Panjang)	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp21.185.355.584,00	Rp 377.544.000,00

Adapun Piutang BOT sebesar Rp21.185.355.584,00 merupakan piutang hasil kerja sama Pemerintah Kota Pematangsiantar atas pemanfaatan eks Plaza Pantoan dan Gedung Olah Raga.

Piutang BOT (jangka panjang) sebesar Rp1.389.425.000,00 merupakan Piutang yang harus diterima oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar atas royalti eks Plaza Pantoan terhitung dari Tahun 2025 s.d. 2029 dengan pembayaran yang disepakati bersama sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Pematangsiantar dengan PT. Inti Griya Prima Sakti Nomor : 09/PKS/2022 tentang optimalisasi tanah gedung eks Plaza Pantoan Jalan Dr. Sutomo kota Pematangsiantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS) sebesar Rp2.071.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2022 senilai	Rp216.600.000,00
- Tahun 2023 senilai	Rp227.240.000,00
- Tahun 2024 senilai	Rp238.425.000,00
- Tahun 2025 senilai	Rp250.385.000,00
- Tahun 2026 senilai	Rp263.145.000,00
- Tahun 2027 senilai	Rp276.740.000,00
- Tahun 2028 senilai	Rp291.300.000,00
- Tahun 2029 senilai	Rp307.855.000,00

Piutang BOT (jangka panjang) sebesar Rp19.795.930.584,00 merupakan Piutang yang harus diterima oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar atas royalti tanah Gedung Olah Raga terhitung dari Tahun 2025 s.d. 2048 dengan pembayaran yang disepakati bersama sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana Nomor : 032/043/V/Perj/Wk Thn 2019 tentang optimalisasi tanah Gedung Olah Raga kota Pematangsiantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS) sebesar Rp20.770.157.058,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2019 senilai	Rp 126.266.943,00
- Tahun 2020 senilai	Rp 138.893.635,00
- Tahun 2021 senilai	Rp 152.782.999,00
- Tahun 2022 senilai	Rp 168.061.298,00
- Tahun 2023 senilai	Rp 184.867.428,00
- Tahun 2024 senilai	Rp 203.354.171,00
- Tahun 2025 senilai	Rp 223.689.588,00
- Tahun 2026 senilai	Rp 246.058.547,00
- Tahun 2027 senilai	Rp 270.664.402,00
- Tahun 2028 senilai	Rp 297.730.842,00
- Tahun 2029 senilai	Rp 327.503.926,00
- Tahun 2030 senilai	Rp 360.254.319,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Tahun 2031 senilai	Rp 396.279.751,00
- Tahun 2032 senilai	Rp 435.907.726,00
- Tahun 2033 senilai	Rp 479.498.498,00
- Tahun 2034 senilai	Rp 527.448.348,00
- Tahun 2035 senilai	Rp 580.193.183,00
- Tahun 2036 senilai	Rp 638.212.501,00
- Tahun 2037 senilai	Rp 702.033.751,00
- Tahun 2038 senilai	Rp 772.237.127,00
- Tahun 2039 senilai	Rp 849.460.839,00
- Tahun 2040 senilai	Rp 934.406.923,00
- Tahun 2041 senilai	Rp1.027.847.615,00
- Tahun 2042 senilai	Rp1.130.632.377,00
- Tahun 2043 senilai	Rp1.243.695.615,00
- Tahun 2044 senilai	Rp1.368.065.176,00
- Tahun 2045 senilai	Rp1.504.871.694,00
- Tahun 2046 senilai	Rp1.655.358.863,00
- Tahun 2047 senilai	Rp1.820.894.749,00
- Tahun 2048 senilai	Rp2.002.984.224,00

2) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp42.271.435.010,49	Rp41.535.432.118,08

Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp42.271.435.010,49 tersebut berasal dari temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP Tahun 2002 s.d. 2020 yang belum ditetapkan pembebanannya sebesar Rp3.590.620.533,28 dan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp38.680.814.477,21 (**rincian pada Lampiran 7 dan 8**). Data tersebut diperoleh dari Matrix Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah per 16 Desember 2022, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 5.42
Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023

No.	Status	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Saldo 31/12/2020 (Rp)
1	Proses Penetapan	3.721.670.533,28	131.050.000,00	3.590.620.533,28
2	Belum Ditindaklanjuti	56.962.885.610,72	18.282.071.133,51	38.680.814.477,21
	Jumlah	60.684.556.144,00	18.413.121.133,51	42.271.435.010,49

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp44.279.134.000,00	Rp27.045.134.000,00

BOT tersebut merupakan Aset Pemerintah Kota Pematangsiantar berupa tanah, gedung dan bangunan yang dimanfaatkan dalam rangka kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Eks Plaza Pantoan terletak di Jl. Dr. Sutomo – Pematangsiantar, yang dimitrakan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama BOT sesuai dengan perjanjian



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

kerjasama antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan PT. Inti Griya Prima Sakti No. 644.1/383/I/2004 dan No. 368/IGPS/PS/I/2004 tanggal 27 Januari 2004. Nilai tanah, gedung dan bangunan yang dimitrakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2007 terdiri atas:

(1) Tanah seluas 4.960 m ²	Rp1.488.000.000,00
(2) Gedung dan bangunan seluas 8.952 m ²	Rp 287.100.000,00
Nilai sebelum inventarisasi	<u>Rp1.775.100.000,00</u>

Dalam rangka penataan dan pemutakhiran data Aset Tetap di seluruh SKPD Pemerintah Kota Pematangsiantar maka pada Tahun 2008 dilakukan inventarisasi dan penilaian Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2007. Inventarisasi dilakukan oleh PT. Indoprofita Konsultama - Jakarta sesuai dengan kontrak No. 028/26/PPK/Sekret-BU/IX/2008 tanggal 25 September 2008.

Berdasarkan pemutakhiran data tersebut, nilai dari tanah dan bangunan eks Plaza Pantoan tersebut berubah, yakni:

(1) Tanah seluas 4.960 m ²	Rp13.389.936.000,00
(2) Gedung dan bangunan seluas 0 m ²	Rp 0,00
Nilai setelah inventarisasi	<u>Rp13.389.936.000,00</u>

b) Aset Tetap senilai Rp13.655.198.000,00 yaitu lokasi Taman Hewan Pematangsiantar yang digunakannya kepada pihak ketiga yakni PT. Uni Twin Indonesia Medan sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 1996 antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan PT. Uni Twin Indonesia Medan No. 556-51a/WK-TAHUN 1996 dan No. 139/EX/UTT/VI/96 tanggal 20 Juni 1996 dan jangka waktu pengunakannya selama 30 tahun, terdiri dari:

(1) Tanah seluas 26.174m ²	Rp 8.006.758.000,00
(2) Gedung dan bangunan seluas 4.914 m ²	Rp 5.416.790.000,00
(3) Aset Tetap Lainnya (hewan dan tanaman)	Rp 231.650.000,00
Jumlah	<u>Rp 13.655.198.000,00</u>

c) Aset Tetap senilai Rp17.234.000.000,00 yaitu tanah Gedung Olah Raga Kota Pematangsiantar yang digunakannya kepada pihak ketiga yakni PT. Suriatama Mahkota Kencana Nomor : 032/043/V/Perj/Wk Thn 2019 tentang optimalisasi tanah Gedung Olah Raga kota Pematangsiantar dengan pola pemanfaatan bangunan serah (BGS) sebesar Rp20.770.157.058,00 tanggal 29 Mei 2019 dan jangka waktu pengunakannya selama 30 tahun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi peningkatan sebesar Rp17.234.000.000,00 atau 63,71%.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

4) Aset Tak Berwujud Tahun 2023 Tahun 2022
Rp3.812.776.700,00 **Rp3.698.366.700,00**

Aset Tak Berwujud senilai Rp3.812.776.700,00 tersebut merupakan perangkat lunak (*software*) dan Kajian yang terdapat pada sembilan SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.43
Software dan Kajian pada SKPD Tahun 2022 dan 2023

No	SKPD / Unit Kerja	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi		Tahun 2023 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Badan Kepegawaian Daerah	35.999.700,00	0,00	0,00	35.999.700,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.182.940.000,00	0,00	0,00	1.182.940.000,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	544.382.000,00	0,00	0,00	544.382.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih	823.173.000,00	0,00	0,00	823.173.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	163.364.000,00	0,00	0,00	163.364.000,00
6	Dinas Kesehatan	125.658.000,00	0,00	0,00	125.658.000,00
7	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	81.950.000,00	0,00	0,00	81.950.000,00
8	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	157.350.000,00	0,00	0,00	157.350.000,00
9	Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu	387.750.000,00	0,00	0,00	387.750.000,00
10	Dinas Perhubungan	195.800.000,00	0,00	0,00	195.800.000,00
11	Dinas Pendidikan	0,00	34.410.000,00	0,00	34.410.000,00
12	Dinas Pariwisata	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Jumlah		3.698.366.700,00	114.410.000,00	0,00	3.812.776.700,00

Aset tidak berwujud diatas memiliki masa manfaat yang tidak terbatas sehingga tidak dilakukan amortisasi. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp3.812.776.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp114.410.000,00 (yang berasal dari belanja modal aset lainnya berupa website Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan pembuatan aplikasi Jelajah Siantar pada Dinas Pariwisata bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

5) **Aset Kondisi Rusak Berat** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp4.197.743.818,00 **Rp2.848.472.009,00**

Aset Kondisi Rusak Berat merupakan aset tetap peralatan dan mesin milik Pemerintah Kota Pematangsiantar yang sudah tidak dapat atau tidak layak digunakan lagi dan sedang dalam proses penghapusan dari aset tetap untuk selanjutnya dilakukan pelelangan. Nilai Aset kondisi rusak berat sebesar Rp4.197.743.818,00 merupakan nilai perolehan dari total nilai Aset Rusak Berat sebesar Rp213.092.557.976,88 dikurang dengan Akumulasi Penyusutan atas Aset Rusak Berat sebesar Rp208.894.814.158,88.

Tabel 5.44
Aset Kondisi Rusak Berat

	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
KIB B	6.773.864.903,00	3.870.940.692,00	2.902.924.211,00
KIB C	2.155.589.800,00	1.955.708.900,00	199.880.900,00
KIB D	203.068.164.566,88	203.068.164.566,88	-
KIB E	1.094.938.707,00	0,00	1.094.938.707,00
Jumlah	213.092.557.976,88	208.894.814.158,88	4.197.743.818,00

6) **Aset Lain-lain** **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp15.489.068.908,18 **Rp15.218.230.635,18**

Aset lain-lain terdiri dari aset gedung dan bangunan yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya senilai Rp1.698.825.976,00 ditambah dengan aset jalan yang tidak teridentifikasi senilai Rp188.414.487.873,88 serta aset jalan yang dibangun diatas aset pihak lain senilai Rp14.412.526.693,00 ditambah dengan aset yang akan dihapuskan sebesar Rp27.300.000,00 sebagai tindak lanjut atas temuan BPK-RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
KIB B	270.838.273,00	0,00	270.838.273,00
KIB C	1.698.825.976,00	86.724.823,00	1.612.101.153,00
KIB D	202.827.014.566,88	193.560.185.084,70	9.266.829.482,18
KIB E	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
Jumlah	204.823.978.815,88	193.646.909.907,70	11.177.068.908,18

Selain itu juga terdapat Aset Lain-lain berupa aset yang diserahkan kepada pihak sekolah swasta pada Tahun 2011 tetapi belum didukung dengan bukti surat hibah dari Pemerintah Kota Pematangsiantar senilai Rp4.312.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.45
Rincian Aset yang Diserahkan Kepada Sekolah Swasta Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembangunan gedung perpustakaan	942.378.000,00	942.378.000,00
2	Buku pengayaan	516.253.302,00	516.253.302,00
3	Alat peraga	282.539.400,00	282.539.400,00
4	Sarana TIK penunjang perpustakaan	105.164.857,00	105.164.857,00
5	Multi interaktif pembelajaran	37.830.000,00	37.830.000,00
6	Pembangunan ruang kelas baru	327.866.000,00	327.866.000,00
7	Rehabilitasi ruang kelas	277.803.000,00	277.803.000,00
8	Buku perpustakaan	819.000.000,00	819.000.000,00
9	Laboratorium bahasa	427.500.000,00	427.500.000,00
10	Laboratorium IPA	278.994.966,00	278.994.966,00
11	Alat olah raga	296.670.475,00	296.670.475,00
	Jumlah	4.312.000.000,00	4.312.000.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp15.218.230.635,18 (Rp10.906.230.635,18 + Rp4.312.000.000,00) tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.

e. Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2023 Rp8.798.200,00	Tahun 2022 Rp7.957.700,00
---	--	--

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga. Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak penerimaan kas daerah yang bersifat non anggaran serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Untuk tahun 2023 utang PFK sebesar Rp0,00 dan kas *outstanding* sebesar Rp8.798.200,00. Saldo kas per 31 Desember 2023 berupa kas Outstanding (belanja yang sudah diakui namun belum dilakukan pembayaran) senilai Rp4.976.100,00 terdapat pada BPKPD dan sebesar Rp3.822.100,00 pada BAPPEDA.

b) Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2023 Rp45.622.500,00	Tahun 2022 Rp12.375.000,00
-------------------------------	---	---

Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar Rp45.622.500,00 merupakan pendapatan atas sewa lokasi mesin ATM BRI pada RSUD dr. Djasamen Saragih. Hal ini sesuai dengan surat perjanjian Nomor: 100.3.7/5050/RSUD/IX/2023 dimana nilai yang disepakati adalah sebesar Rp52.140.000,00 dihitung mulai 01 Oktober 2023 dan berakhir pada 30 September 2025. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp33.247.500,00 atau sebesar 268,67%.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

c) Utang Belanja	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp15.645.677.708,20	Rp17.856.753.382,69

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran. Utang belanja senilai Rp15.645.677.708,20 terdiri atas:

- 1) Utang belanja pegawai sebesar Rp10.974.804.864,00;
- 2) Utang belanja persediaan sebesar Rp392.347.370,00;
- 3) Utang belanja jasa sebesar Rp4.250.628.519,20;
- 4) Utang belanja pemeliharaan sebesar Rp27.896.955,00.

Rincian utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa berdasarkan SKPD disajikan pada (**Lampiran 12 s.d 15**).

d) Utang Bunga	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp0.00	Rp0.00

Jumlah Utang tersebut merupakan bunga, denda, biaya administrasi, dan *commitment fee* atas Pinjaman Luar Negeri dan kepada Pemerintah Pusat yang telah selesai pembayarannya per 31 Desember 2023 namun masih tetap disajikan menunggu proses penutupan pinjaman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.46
Rincian Utang Bunga Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SLA-1006/DDI/1991 tanggal 17 Desember 1997	0.00
	Jumlah	0.00

Utang Bunga dan Jasa Bank Pinjaman kepada Asian Development Bank dengan SLA No. 1006/DDI/1991 tanggal 17 Desember 1997 sebesar Rp0.00 karena sudah lunas pada 8 Desember 2017 namun masih tetap disajikan menunggu proses penutupan pinjaman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.00 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2022.

e) Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp574.134.531,06	Rp23.701.313.075,48

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp574.134.531,06 berasal dari total paket pekerjaan yang nilai pembayarannya masih dibawah nilai fisik pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.47
Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023

No.	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	448.914.361,06	23.149.812.495,48
2	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	7.494.400,00	193.766.880,00
3	Dinas Pendidikan	117.725.770,00	228.610.700,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	129.123.000,00
	Jumlah	574.134.531,06	23.701.313.075,48

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Kepada Pemerintah Pusat	Tahun 2023 Rp0,00	Tahun 2022 Rp0,00
----------------------------------	----------------------	----------------------

Untuk tahun 2023 Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat.

b) Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	Tahun 2023 Rp0,00	Tahun 2022 Rp0,00
--	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan Utang Luar Negeri yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, sesuai hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Penerusan Pengelolaan Pinjaman pada Departemen Keuangan. Jumlah Pokok Pinjaman Luar Negeri SLA No. 1006/DP3/1997 tanggal 17 Desember 1997 sebesar Rp0,00.

Pinjaman dengan SLA No. 1006/DP3/1997 tanggal 17 Desember 1997 merupakan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk pembiayaan *Sumatera Urban Development Project* (SUDP). Pinjaman disetujui dengan ditandatanganinya perjanjian (*loan agreement*) No.1383-INO & 984-INO tanggal 26 Januari 1996 antara ADB dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan plafon pinjaman sebesar Rp762.256.000,00 untuk jangka waktu 20 tahun. Pokok pinjaman kepada ADB dengan SLA No. 1006/DDI/1997 tanggal 17 Desember 1997 sebesar Rp0.00 merupakan saldo pokok pinjaman per 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut.

- Saldo awal per 1 Januari 2023	Rp	0,00
- Pengurangan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang	Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Saldo Kewajiban Jangka Panjang atas Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 maka tidak terjadi perubahan.

f. Ekuitas	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp4.579.958.346.435,79	Rp4.540.568.691.182,37

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, meliputi kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Lebih terperinci mengenai ekuitas dan perubahannya dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang tercermin dalam Pendapatan -LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional.

a. Pendapatan -LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah - LO	86.519.194.336,00	79.408.253.695,00
2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.247.068.850,00	11.538.882.600,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	10.204.020.207,00	11,571,171,198.00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	37.399.543.060,14	34,127,007,413.93
Jumlah	145.369.826.453,14	136.645.314.906,93

Realisasi masing-masing PAD TA 2023 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Atas pajak BPHTB senilai Rp29.625.921.718,00 dicatat sebesar realisasi Tahun Anggaran 2023 sedangkan atas pajak daerah lainnya dicatat sebesar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Rincian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LO	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1 Pajak Hotel	3.452.312.607,00	3.130.850.847,00
2 Pajak Restoran	13.641.618.240,00	10.422.232.444,00
3 Pajak Hiburan	1.341.507.740,00	1.431.633.549,00
4 Pajak Reklame	3.565.386.000,00	3.438.032.000,00
5 Pajak Penerangan Jalan	21.738.702.959,00	20.349.789.392,00
6 Pajak Parkir	604.110.078,00	526.753.950,00
7 Pajak Air Bawah Tanah	608.635.000,00	575.149.000,00
8 Pajak Bumi dan Bangunan	11.940.999.994,00	11.916.087.381,00
9 Pajak BPHTB	29.625.921.718,00	27.617.725.132,00
J u m l a h	86.519.194.336,00	79.408.253.695,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah - LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp3.631.563.996,00 . Perbedaan ini disebabkan oleh pencatatan Pendapatan Pajak Daerah – LO didasarkan pada surat ketetapan yang diterbitkan (*Accrual Based*), sedangkan Pendapatan Pajak Daerah – LRA didasarkan pada realisasi penerimaan termasuk piutang tahun sebelumnya (*Cash Based*).

b) **Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi pendapatan retribusi TA 2023 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Pelayanan kesehatan	149.068.000,00	133.814.000,00
2 Pelayanan persampahan/ kebersihan	2.546.264.900,00	2.520.745.500,00
3 Pelayanan penguburan/pemakaman	19.350.000,00	18.275.000,00
4 Pelayanan parkir di tepi jalan umum	7.173.993.000,00	6.685.528.000,00
5 Pengujian kendaraan bermotor	182.441.750,00	171.703.000,00
6 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.780.000,00	30.000.000,00
7 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66.720.000,00	35.190.000,00
8 Pemakaian Kekayaan Daerah	90.550.000,00	77.100.000,00
9 Tempat Khusus Parkir	26.362.000,00	19.261.500,00
10 Retribusi Rumah Potong Hewan	382.605.000,00	360.290.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Retribusi Daerah		2023 (Rp)	2022 (Rp)
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.400.000,00	0,00
12	Retribusi persetujuan bangunan gedung	550.914.200,00	1.422.265.600,00
13	Izin tempat penjualan minuman beralkohol	750.000,00	750.000,00
14	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	42.870.000,00	63.960.000,00
Jumlah		11.247.068.850,00	11.538.882.600,00

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LO karena realisasi pendapatan atas retribusi daerah sama dengan retribusi yang ditetapkan pada tahun 2023.

c) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau BUMD. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas.

Pada tahun 2023 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagi hasil atas laba PDAM Tirtauli Tahun 2022 yang diterima tahun 2023. dan deviden yang dibayarkan oleh PT. Bank Sumut. dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dividen dari PDAM Tirtauli	700.000.000,00	1.778.598.196,00
2	Dividen dari Bank Sumut	9.504.020.207,00	9.781.206.262,00
3	Dividen dari PD PAUS	0,00	11.366.740,00
Jumlah		10.204.020.207,00	11.571.171.198,00

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO karena realisasi pendapatan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sama dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

d) **Lain-lain PAD yang Sah**

Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang realisasinya adalah sebagai berikut.

Lain-lain PAD yang Sah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	222.761.129,00	756.124.942,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.040.906.171,00	22.750.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	550.120.258,00
Penerimaan jasa giro	3.607.820.448,00	3.769.175.631,00
Pendapatan Bunga	218.825,92	0,00
Tuntutan ganti kerugian daerah	111.868.257,00	2.657.982.986,92
Komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah	181.141.637,17	306.452.733,16
Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan	1.104.910.957,67	33.002.185,00
Pendapatan Denda Pajak	464.919.588,00	1.816.341.573,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	3.500.000,00	0,00
Pendapatan dari pengembalian	1.019.440.945,38	379.331.392,25
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Fasilitas sosial dan fasilitas umum	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	27.889.447.163,00	22.691.479.435,00
Hasil pengelolaan dana bergulir	1.752.607.938,00	458.555.560,00
Piutang Lain-lain	0,00	685.690.717,60
JUMLAH	37.399.543.060,14	34.127.007.413,93

Terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang Sah - LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah - LO sebesar Rp660.619.122,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ditetapkan sebesar Rp1.040.906.171,00 namun terealisasi sebesar Rp1.011.234.428,00 ditambah dengan realisasi atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp412.107.428,00 dan dikurang piutang 2023 sebesar Rp441.779.171,00 sehingga selisih sebesar Rp29.671.743,00.
2. Pendapatan Denda Pajak ditetapkan sebesar Rp464.919.588,00 namun terealisasi sebesar Rp62.567.918,00 ditambah dengan realisasi atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp699.524.504,00 sehingga selisih sebesar Rp297.172.834,00.
3. Pendapatan BLUD ditetapkan sebesar Rp27.889.447.163,00 namun terealisasi sebesar Rp26.961.326.950,00 ditambah dengan realisasi atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp2.387.248.750,00 dikurang piutang tahun ini sebesar Rp3.348.616.463,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp928.120.213,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

2) **Pendapatan Transfer – LO**

Pendapatan transfer tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	736.161.093.450,00	714.238.343.269,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi - LO	70.451.902.489,00	63.482.691.577,00
JUMLAH	806.612.995.939,00	777.721.034.846,00

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer – LO.

a) **Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk periode TA 2023 dan 2022 terdiri dari:

Dana Perimbangan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	31.447.748.818,00	37.535.276.039,00
Dana Alokasi Umum	575.941.925.178,00	552.755.271.500,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	22.750.573.432,00	14.731.433.221,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	106.020.846.022,00	98.779.822.509,00
Dana Insentif Daerah	0,00	10.436.540.000,00
Jumlah	736.161.093.450,00	714.238.343.269,00

Terdapat perbedaan antara Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO.

1. Bagi hasil Pajak

Pendapatan Bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terdiri dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bea perolehan, dan pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.932.875.400,00	5.692.574.267,00
DBH PPh Pasal 21	15.823.867.818,00	13.258.252.919,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.479.562.000,00	2.479.721.210,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.377.181.000,00	4.810.481.888,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	12.581.000,00	33.201.500,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	14.841.000,00	46.549.308,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	168.479.600,00	261.922.092,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty	1.457.361.000,00	8.973.520.587,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.921.059.000,00	308.565.168,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00	1.670.487.100,00
Jumlah	31.447.748.818,00	37.535.276.039,00

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar Rp575.941.925.178,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU TA 2023 untuk Kota Pematangsiantar telah diterima seluruhnya pada tahun 2023.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik sebesar Rp22.750.573.432,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak pemerintah daerah atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut :

Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	645.162.400,00	270.930.600,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	1.154.146.067,00	1.289.875.650,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	1.633.553.592,00	2.589.076.600,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	314.821.500,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	0,00	286.922.189,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	439.768.120,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	0,00	1.591.050.725,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.187.011.000,00	0,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	4.616.767.000,00	1.509.969.064,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan Stunting (KB)	0,00	21.368.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	1.805.882.548,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler	3.993.758.000,00	1.390.590.750,00
DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.299.289.125,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.710.200.316,00	876.930.619,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.154.300.000,00	2.342.246.856,00
DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	356.385.932,00	0,00
Jumlah	22.750.573.432,00	14.731.433.221,00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Fisik sebesar Rp106.019.276.479,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak pemerintah daerah atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut :

Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.044.655.396,00	38.256.930.865,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.292.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik TPG PNSD	38.189.520.000,00	46.180.814.900,00
DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	8.256.814.720,00	212.325.000,00
DAK Non Fisik BOP PAUD	2.866.044.000,00	2.149.226.000,00
DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	676.100.000,00	582.000.000,00
DAK Non Fisik BOKKB BOK	9.640.747.700,00	7.959.539.000,00
DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
DAK Non Fisik BOKKB Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00
DAK Non Fisik BOKKB Jaminan Persalinan	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DAK Non Fisik BOKKB BOKB	3.696.441.902,00	0,00
DAK Non Fisik PK2UMK	0,00	202.100.000,00
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	348.022.304,00	276.696.781,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	1.976.181.457,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	225.900.000,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	588.400.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	169.708.506,00
JUMLAH	106.020.846.022,00	98.779.822.509,00

5. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2023 yang merupakan dana yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp0,00.

b) **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Untuk periode tahun 2023 tidak ada lagi Penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya karena penerimaan tunjangan profesi guru PNSD yang sebelumnya menempati pos tersebut sudah menjadi penerimaan DAK non fisik.

c) **Transfer Pemerintah Provinsi**

1. Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Bagi Hasil -LO sebesar Rp65.830.071.380,00 merupakan bagi hasil pajak provinsi yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.223.647.617,00	10.939.707.790,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.848.914.746,00	3.699.995.028,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.910.594.965,00	18.193.824.215,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	722.912.785,00	313.800.757,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.124.001.267,00	19.374.063.787,00
Jumlah	65.830.071.380,00	52.521.391.577,00

2. Pendapatan Lainnya – LO

Pendapatan Lainnya LO sebesar Rp4.621.831.109,00 merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

3) **Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah**

a) **Pendapatan Hibah LO**

Pendapatan Hibah LO pada tahun 2023 sebesar Rp894.000.000,00. Pendapatan Hibah LO tersebut merupakan realisasi Pendapatan Hibah dari Kementerian PUPR untuk program hibah air minum perkotaan dalam rangka meningkatkan akses air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

b) **Pendapatan Dana Darurat - LO**

Pendapatan Dana Darurat pada tahun 2023 sebesar Nihil .

c) **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO merupakan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dicatat senilai Rp8.991.723.029,00.

6. **Beban**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun beban TA 2023 adalah sebagai berikut:

Beban	2023	2022
Beban Pegawai	432.846.210.520,00	429.198.366.779,00
Beban Persediaan	83.775.050.548,42	64.038.071.613,30
Beban Jasa	145.449.785.002,00	133.697.387.235,82
Beban Pemeliharaan	14.753.898.258,20	21.913.184.032,95
Beban Perjalanan Dinas	39.395.123.734,00	33.948.240.747,00
Beban Hibah/Subsidi	43.572.226.107,00	29.637.809.398,00
Beban Bantuan Sosial	1.887.966.804,00	7.318.458.550,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	230.065.509.786,25	303.250.209.576,24
Beban Penyisihan Piutang	3.129.966.450,91	1.395.934.405,88
Beban Lain-lain	3.425.204.407,00	2.195.969.696,42
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
JUMLAH	998.300.941.617,78	1.026.593.632.034,61

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi. Beban Transfer. Defisit Non Operasional. dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

1. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut :

Beban Pegawai	Realisasi 2023	Beban 2023	Beban 2022
Gaji dan Tunjangan	276.855.133.062,00	277.050.257.258,00	278.243.761.725,00
Tambahan Penghasilan PNS	112.838.281.320,00	118.284.308.552,00	114.196.359.533,00
Tambahan Objektif Lainnya ASN	7.561.321.013,00	7.561.321.013,00	5.215.691.121,00
Gaji & Tunjangan DPRD	12.105.662.712,00	12.105.662.712,00	12.136.724.712,00
Gaji & Tunjangan KDH/WKDH	465.652.494,00	465.652.494,00	427.531.808,00
Penerimaan Lain KDH/WKDH & DPRD	490.853.518,00	471.463.241,00	502.985.963,00
Belanja Pegawai BLUD	16.902.776.810,00	16.907.545.250,00	18.475.311.917,00
JUMLAH	427.219.680.929,00	432.846.210.520,00	429.198.366.779,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebesar Rp5.626.529.591,00 yang berasal dari Utang beban tahun ini sebesar Rp10.974.804.864,00 dikurang utang beban tahun lalu setelah dikoreksi sebesar Rp5.348.275.273,00.

2. **Beban Persediaan**

Beban persediaan terdiri atas beban sebagai berikut:

Beban Persediaan	REALISASI 2023	BEBAN 2023	BEBAN 2022
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.153.014.861,00	3.082.470.773,13	1.503.597.786,00
Bahan Kimia	599.972.278,00	1.797.888.143,00	1.613.321.658,00
Bahan Bakar & Pelumas	5.251.928.334,00	5.466.697.184,00	1.766.188.907,00
Bahan/Bibit Tanaman	458.511.376,00	491.596.040,00	263.109.400,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.600.000,00	35.665.800,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.468.000,00	363.476.000,00	0,00
Bahan-bahan bibit Ternak/Bibit Ikan	139.746.800,00	180.196.300,00	2.360.000,00
Bahan-bahan lainnya	2.195.118.170,00	5.608.475.771,00	10.676.205.656,00
Suku Cadang Alat Angkutan	134.941.749,00	135.774.053,00	342.189.970,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	1.309.959.919,00	1.107.995.203,00	4.187.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	35.966.245,00	140.831.808,00	0,00
ATK	5.547.017.881,00	7.749.315.814,17	5.178.011.841,00
Kertas & Cover	1.791.240.668,00	1.829.666.463,00	2.193.608.099,00
Bahan Cetak	6.435.792.100,00	8.014.134.387,50	7.417.696.936,00
Benda Pos	141.833.277,00	149.443.327,00	155.924.988,00
Bahan Komputer	1.647.361.871,00	1.463.925.344,00	974.454.857,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.038.000,00	1.180.786.724,03	0,00
Alat Listrik	739.848.872,00	1.138.170.285,75	1.580.275.936,00
Perlengkapan Dinas	122.700.000,00	166.027.500,00	152.046.000,00
Perlengkapan Olah-raga	181.785.858,00	338.054.604,62	167.562.708,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Souvenir/ Cinderamata	265.097.000,00	326.554.941,00	443.796.744,00
Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.977.082.356,00	4.074.105.197,00	4.043.551.193,00
Obat-obatan	4.349.952.880,00	9.809.628.646,22	3.863.874.508,30
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	93.287.215,00	93.287.215,00	0,00
Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.483.535.250,00	2.493.862.550,00	3.671.834.860,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	13.756.787.356,00	4.316.066.341,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.652.916.545,00	1.653.416.545,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.859.238.516,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	262.836.000,00	260.136.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.304.192.702,00	7.510.145.367,00	12.720.309.411,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.579.531.789,00	3.607.041.385,00	0,00
Penambah Daya Tahan Tubuh	941.533.051,00	1.456.825.526,00	1.745.279.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	57.815.000,00	460.191.200,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.577.039.145,00	3.577.039.145,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	17.775.540,00	17.775.540,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	513.970.000,00	513.970.000,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.815.000,00	107.815.000,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	260.740.300,00	261.340.300,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14.815.170,00	14.815.170,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.876.780,00	22.210.765,00	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	1.973.580,00	1.973.580,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	200.370.946,00	262.272.440,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	437.959.120,00	437.959.120,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	59.459.000,00	63.059.000,00	0,00
Belanja Pakaian Paskibraka	28.270.000,00	35.628.963,00	0,00
Pakaian	0,00	0,00	1.488.775.882,00
Belanja Komponen-komponen Lainnya	1.996.250.000,00	1.955.539.087,00	210.669.757,00
JUMLAH	73.870.527.984,00	83.775.050.548,42	64.038.071.613,30

Terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan - LRA dengan Beban Persediaan - LO sebesar Rp9.904.522.564,42 yang berasal dari Persediaan awal sebesar Rp14.944.676.929,69 ditambah Utang Belanja Persediaan tahun ini sebesar Rp392.347.370,00 ditambah Reklas dari aset tetap sebesar Rp509.170.637,66 ditambah Reklas dari Dana BOS Rp8.957.025.596,17 ditambah Reklas Dana BLUD sebesar Rp10.305.821.581,37 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp22.556.769.596,47 dikurangi utang tahun lalu sebesar Rp193.199.437,00 dan dikurangi reklas ke aset tetap sebesar Rp2.454.550.517,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

3. **Beban Jasa**

Beban jasa terdiri atas beban sebagai berikut :

BEBAN JASA	REALISASI 2023	BEBAN 2023	BEBAN 2022
Beban Jasa Kantor	97.321.830.585,00	98.684.576.564,86	102.755.912.856,00
Beban Iuran Jaminan/asuransi	13.395.461.337,00	12.991.270.939,00	10.725.366.815,00
Beban Sewa Tanah	0,00	55.000.000,00	63.570.000,00
Beban Sewa Peralatan Mesin	5.528.576.180,00	5.571.665.150,00	3.702.242.900,00
Beban Sewa Gedung Bangunan	962.334.750,00	998.918.083,33	1.233.698.333,33
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.541.578.255,00	7.546.514.742,81	4.182.738.923,49
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.743.981.850,00	1.743.981.850,00	1.478.503.900,00
Beban Kursus Pelatihan	4.728.629.689,00	5.613.435.288,00	4.023.091.740,00
Beban Jasa Insentif Non ASN Pajak	978.924.175,00	978.924.175,00	904.310.720,00
Beban Jasa Insentif Non ASN Retribusi	108.500.000,00	377.769.740,00	0,00
Beban Jasa Untuk diberikan ke Pihak III	5.645.119.800,00	10.887.728.469,00	4.627.951.048,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00
Reklas dari BTT Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00
Jumlah	139.954.936.621,00	145.449.785.002,00	133.697.387.235,82

Terdapat perbedaan antara Belanja Jasa - LRA dengan Beban Jasa - LO sebesar Rp5.494.848.381,00 yang berasal dari Utang Beban Jasa Tahun ini sebesar Rp4.250.628.519,20 dikurang Utang beban Jasa Tahun Lalu sebesar Rp11.716.921.869,19 ditambah Reklas Dana BOS sebesar Rp8.285.078.043,66 ditambah Reklas Dana BLUD sebesar Rp9.290.504.639,00 dikurang Reklas ke aset tetap RpRp4.669.274.285,00 ditambah Beban dibayar dimuka tahun lalu sebesar Rp74.833.333,33 dikurang beban dibayar dimuka tahun ini sebesar Rp20.000.000,00.

4. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan terdiri atas beban sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	REALISASI 2023	BEBAN 2023	BEBAN 2022
Pemeliharaan Tanah	858.605.107,00	1.076.144.107,00	299.392.394,00
Pemeliharaan Peralatan Mesin	8.001.031.334,00	10.279.688.703,66	14.925.802.831,00
Pemeliharaan Gedung Bangunan	7.188.203.738,00	2.429.636.565,04	6.507.876.774,45
Pemeliharaan JIJ	5.513.732.846,00	933.497.182,50	180.112.033,50



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	34.931.700,00	34.931.700,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	21.596.504.725,00	14.753.898.258,20	21.913.184.032,95

Terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan - LRA dengan Beban Pemeliharaan - LO sebesar Rp6.842.606.466,80 yang berasal dari Utang Beban Pemeliharaan Tahun Ini sebesar Rp27.896.955,00 dikurang Utang beban Pemeliharaan Tahun Lalu sebesar Rp595.552.510,50 ditambah Reklas Dana BOS sebesar Rp1.073.911.814,66 ditambah Reklas BLUD sebesar Rp2.534.154.283,00 dan dikurang Reklas ke Aset Tetap Rp9.883.017.008,96.

5. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas terdiri atas beban sebagai berikut:

Beban perjalanan dinas	REALISASI 2023	BEBAN 2023	BEBAN 2022
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.911.456.134,00	31.911.456.134,00	26.751.094.747,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.366.817.600,00	7.366.817.600,00	7.197.146.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	116.850.000,00	116.850.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	39.395.123.734,00	39.395.123.734,00	33.948.240.747,00

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas.

6. **Beban Bunga**

Beban bunga terdiri atas beban sebagai berikut :

Beban Bunga	2023	2022
Bunga Utang Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

7. **Beban Hibah**

Beban hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pematangsiantar atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2023 dan 2022 terdiri atas :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Beban Hibah	Realisasi 2023	Beban 2023	Beban 2022
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	43.572.226.107	43.572.226.107,00	29.637.809.398,00
Jumlah	43.572.226.107	43.572.226.107,00	29.637.809.398,00

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Hibah - LRA dengan Beban Hibah - LO.

8. **Beban Bantuan Keuangan**

Beban bantuan keuangan terdiri atas beban sebagai berikut :

Beban Bantuan Keuangan	2023	2022
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Pada TA 2023, beban bantuan keuangan yang diperuntukkan kepada parpol dianggarkan dan direalisasikan pada pos beban hibah.

9. **Beban Bantuan Sosial**

Beban bantuan sosial merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pematangsiantar atas pemberian bantuan sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar. Berdasarkan kelompok penerima, beban bantuan sosial TA 2023 terdiri atas :

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2023	Beban 2023	Beban 2022
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	25.554.104,00	5.577.850.000,00
Bantuan Sosial Kpd Kelompok Masyarakat	612.500.000,00	612.500.000,00	499.818.950,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.249.912.700,00	1.249.912.700,00	1.240.789.600,00
Jumlah	1.862.412.700,00	1.887.966.804,00	7.318.458.550,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial - LRA dengan Beban Bantuan Sosial - LO sebesar Rp25.554.104,00 yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2023 diperuntukkan untuk biaya perawatan rumah sakit bagi keluarga tidak mampu.

10. **Beban Penyisihan Piutang**

Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih diterapkan mulai TA 2015 berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2014 tentang



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih terdiri atas:

No.	Jenis Piutang	Akumulasi Penyisihan Piutang 2023	Akumulasi Penyisihan Piutang 2022
A	B	C	D
1.	Piutang Pajak	31.900.003.505,86	29.866.100.094,62
2.	Piutang Retribusi	1.789.448.901,00	1.789.448.901,00
3.	Piutang Transfer	0,00	0,00
4.	Piutang TGR	302.924.465,09	302.924.465,09
5.	Piutang BLUD RSUD	16.743.082,32	11.936.243,75
6.	Piutang Deviden PDAM	0,00	0,00
7.	Piutang Denda	16.005.118.867,03	14.913.862.665,93
Jumlah		50.014.238.821,29	46.884.272.370,39
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023			3.129.966.450,90

11. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan akun untuk menampung beban atas aset tetap yang ada di KIB tetapi tidak dicatat pada neraca (ekstrakompetabel), dengan rincian :

Ekstrakompetabel 2023 :	Rp 43.744.032.303,00
Ekstrakompetabel 2022 :	Rp 40.318.827.896,00
Beban Lain – lain (Ekstrakompetabel) :	Rp 3.425.204.407,00

12. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Pembentukan Penyusutan dan Amortisasi diterapkan mulai TA 2015 berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Adapun yang disajikan dalam laporan keuangan adalah penyusutan atas aset tetap saja, sedangkan amortisasi atas aset tidak berwujud tidak dilakukan karena aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Saldo Penyusutan terdiri atas:

Jenis Penyusutan	Beban Penyusutan	Beban Penyusutan Rusak Berat	Total
Peralatan dan Mesin	39.675.300.760,00	449.244.966,00	40.124.545.726,00
Bangunan dan Gedung	34.055.984.227,77	368.405.358,00	34.424.389.585,77
Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.492.473.834,48	24.100.640,00	155.516.574.474,48
Jumlah	229.223.758.822,25	841.750.964,00	230.065.509.786,25



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

13. **Beban Luar Biasa**

Beban luar biasa terdiri atas beban sebagai berikut :

Beban Luar Biasa	2023	2022
Beban Luar Biasa	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

Berdasarkan Panduan Penerapan SAP yang diterbitkan oleh KSAP, Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Laporan Operasional (LO) tidak disajikan dalam Pos Luar Biasa, melainkan diklasifikasikan dan didistribusikan ke jenis beban dan aset terkait. Beban yang berasal dari belanja tidak terduga tersebut telah didistribusikan ke beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bantuan sosial, dan aset tetap. Penjelasan hasil mapping BTT dapat dilihat pada CaLK terkait akun belanja tidak terduga – LRA, serta akun beban dan aset tetap terkait.

b. **Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pos untuk mencatat laba/rugi dari perusahaan daerah pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Laba Perumda Tirta Uli	Rp2.001.050.478,00
- Laba PD Pembangunan dan Aneka Usaha	Rp 12.746.712,00
- Rugi PD Pasar dan Horas Jaya	Rp (155.112.857,00)
- Pendapatan Hibah dari Bank Indonesia	Rp 13.400.000,00
Jumlah	Rp1.872.084.333,00

c. **Surplus/Defisit LO**

Surplus/(Defisit)-LO TA 2023 sebesar Rp3.468.313.222,36 berasal dari pendapatan LO sebesar Rp999.897.170.507,14 dikurangi beban sebesar Rp998.300.941.617,78 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.872.084.333,00.

5. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.579.958.346.435,79 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.540.568.691.182,37 ditambah surplus/ defisit LO tahun 2023 sebesar Rp3.468.313.222,36 ditambah koreksi ekuitas tahun 2023 sebesar Rp35.921.342.031,06.

a. **Ekuitas Awal**

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp4.540.568.691.182,37 berasal dari saldo ekuitas pada neraca per 31 Desember 2022. Neraca per 31 Desember 2022 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

b. Surplus / Defisit LO

Surplus / Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp3.468.313.222,36 berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2023, yang dapat dilihat dalam Laporan Operasional dan catatan atas laporan keuangan atas akun surplus/defisit pada Laporan Operasional.

c. Koreksi Ekuitas – Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Lain-Lain

Koreksi ekuitas pengaruh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar – lain-lain adalah sebesar Rp35.921.342.031,06 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Penambah Ekuitas		48.097.074.801,67
Koreksi Penyisihan Piutang BLUD	69.267.389,25	
Koreksi Piutang Denda Pajak	1.857.004.741,08	
Koreksi Piutang BLUD	201.195.900,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak	35.125.734,50	
Koreksi Penyisihan Piutang Denda Pajak	120.956.259,17	
Koreksi Utang Gaji dan Tunjangan DKPP	4.467.400,00	
Koreksi Utang Gaji dan Tunjangan Inspektorat	1.992.104,00	
Koreksi Piutang BOT jangka panjang	21.249.590.755,00	
Koreksi Piutang Lainnya BOT (jangka pendek)	349.183.428,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR	7.616.588,26	
Koreksi Aset Lainnya TGR	736.002.892,41	
Koreksi Penyisihan Piutang Aset Lainnya TGR	3.680.014,46	
Koreksi akumulasi penyusutan	23.460.991.595,54	
Koreksi Pengurang Ekuitas		12.175.732.770,61
Koreksi Piutang Pajak	33.893.626,00	
Koreksi Utang Gaji dan Tunjangan BAPPEDA	1.634.250,00	
Koreksi Utang Gaji dan Tunjangan BKD	2.020.961,00	
Koreksi Bagian Lancar TGR	1.523.317.652,08	
Koreksi Aset Tetap Gedung & Bangunan Dinas PKP	0,42	
Penghapusan	9.098.677.045,00	
Koreksi Ekuitas lainnya	1.516.189.236,11	
Jumlah Kumulatif Koreksi Tambah (Kurang) Ekuitas		35.921.342.031,06



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Aktivitas Transistoris. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pematangsiantar menggambarkan saldo awal, pengeluaran dan saldo akhir selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Pematangsiantar mengalami Penurunan Kas sebesar Rp55.473.306.559,35 yang berasal dari:

Tabel 5.48
Rincian Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
		2023	2022	
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	161.330.849.409,65	190.542.176.643,33	(29.191.144.358,68)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(216.803.905.969,00)	(141.096.937.513,00)	(75.733.081.073,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	(250.000,00)	(1.799.683,00)	1.549.683,00
	Jumlah	(55.473.306.559,35)	49.443.439.447,33	(104.922.675.748,68)

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah Penurunan Kas TA 2023 sebesar Rp55.473.306.559,35.

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp161.330.849.409,65	Rp190.542.176.643,33

Arus Kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Pematangsiantar selama TA 2023. yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 sebesar Rp161.330.849.409,65 mengalami penurunan sebesar Rp29.211.327.233,68 atau 18,11% dari TA 2022 sebesar Rp190.542.176.643,33.

1) Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp957.352.031.433,00 terdiri dari:

Tabel 5.49
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
		2023	2022	
1	Pendapatan Pajak Daerah	82.887.630.340,00	76.809.964.223,00	6.077.666.117,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.247.068.850,00	11.538.882.600,00	(291.813.750,00)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
		2023	2022	
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.204.020.207,00	10.281.206.262,00	(77.186.055,00)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.516.162.809,14	55.000.814.503,32	(18.484.651.889,33)
5	Dana Transfer Umum DBH	31.447.748.818,00	37.535.276.039,00	(6.087.527.221,00)
6	Dana Transfer Umum DAU	575.941.925.178,00	552.755.271.500,00	23.186.653.678,00
7	Dana Transfer Khusus DAK Fisik	22.750.573.432,00	14.731.433.221,00	8.019.140.211,00
8	Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik	106.020.846.022,00	98.779.822.509,00	7.241.357.796,00
9	Dana Insentif Daerah	0,00	10.436.540.000,00	(10.436.540.000,00)
10	Pendapatan Bagi Hasil	65.830.071.380,00	52.521.391.577,00	13.308.679.803,00
11	Pendapatan Lainnya	4.621.831.109,00	10.961.300.000,00	(6.339.468.891,00)
12	Pendapatan Hibah	894.000.000,00	1.020.000.000,00	(126.000.000,00)
13	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Lainnya	8.991.723.026,00	6.692.512.472,00	2.299.210.554,00
	Jumlah	957.353.601.174,14	939.064.414.906,33	18.289.520.352,81

Dari tabel diatas diketahui bahwa Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.289.186.267,81 atau 1,95% bila dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 sebesar Rp939.064.414.906,33.

2) Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp796.002.902.974,49 terdiri dari:

Tabel 5.50
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
		2023	2022	
1	Belanja Pegawai	427.219.680.929,00	429.518.075.890,00	(2.298.394.961,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	316.229.886.924,49	272.059.802.571,00	44.170.084.353,49
3	Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Hibah/Subsidi	43.572.226.107,00	29.447.634.182,00	14.124.591.925,00
5	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
6	Bantuan Sosial	1.862.412.700,00	7.261.295.850,00	(5.398.883.150,00)
7	Belanja Tak Terduga	7.138.545.104,00	10.235.429.770,00	(3.096.884.666,00)
8	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
9	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
10	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	796.022.751.764,49	748.522.238.263,00	47.500.513.501,49



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp47.500.513.501,49 atau 6,35% jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 sebesar Rp748.522.238.263,00.

b. Arus Kas Bersih dari	Tahun 2023	Tahun 2022
Aktivitas Investasi	(216.803.905.969,00)	(141.096.937.513,00)

Arus kas ini merupakan saldo Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pematangsiantar selama TA 2023, yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Rincian atas Aktivitas Investasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

1) **Arus Masuk Kas**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp222.761.129,00 terdiri dari:

Tabel 5.51
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		2023	2022	
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	222.761.129,00	518.763.644,00	(296.002.515,00)
4	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	61.300.000,00	(61.300.000,00)
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	222.761.129,00	580.063.644,00	(357.302.515,00)

2) **Arus Keluar Kas**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp217.052.779.715,00 terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.52
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Tahun 2023 Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
		2023	2022	
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tanah	9.177.000.000,00	9.133.470.000,00	43.530.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin	49.273.209.221,00	30.000.219.636,00	19.299.102.202,00
4	Belanja Gedung dan Bangunan	25.113.445.730,00	15.265.732.338,00	9.847.713.392,00
5	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.706.035.301,00	77.982.437.000,00	45.723.598.301,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.142.566.846,00	4.725.057.227,00	(1.582.490.381,00)
7	Belanja Aset Lainnya	114.410.000,00	0,00	114.410.000,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	4.570.084.956,00	1.929.915.044,00
9	Pemberian Dana Bergulir Bagi Pelaku UKM	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(217.026.667.098,00)	(141.096.937.513,00)	(75.706.968.456,00)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp75.349.665.941,00 atau 53,18% jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2023 Rp0.00	Tahun 2022 Rp0.00
--	------------------------------	------------------------------

Arus kas ini merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

1) Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 adalah Nihil.

2) Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 adalah Nihil.

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	Tahun 2023 (Rp250.000,00)	Tahun 2022 (Rp1.799.683,00)
---	--------------------------------------	--

Arus Kas dari Aktifitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Selama tahun 2023 aktivitas transistoris Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah atas penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga dimana penerimaan PFK sebesar Rp78.690.599.035,00 dan pengeluaran PFK sebesar Rp78.690.849.035,00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transistoris adalah sebesar (Rp250.000,00).



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB VI
PENGUNGKAPAN LAIN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TA 2023

1. Peristiwa Kemudian

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pematangsiantar mencatat *subsequent events* yaitu kejadian - kejadian setelah tanggal pelaporan neraca namun mempengaruhi Laporan Keuangan 2023 antara lain :

Piutang Pajak :

Penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang diterima bulan Januari 2024 senilai Rp1.980.598.890,00 dicatat sebagai piutang PPJU 2023 karena merupakan pendapatan atas PPJU Desember 2023.

2. Kewajiban Kontinjensi

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Pematangsiantar mencatat 4 (empat) Kewajiban Kontinjensi. namun sesuai dengan perkembangan diketahui bahwa pada Tahun 2012 satu Kewajiban Kontinjensi telah memiliki ketetapan hukum yang tetap sehingga Pemerintah Kota Pematangsiantar harus mengakuinya sebagai pengeluaran belanja pada Belanja Tak Terduga. Adapun kewajiban kontinjensi yang masih berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut.

Putusan Perkara

Penggugat : Marihot Nainggolan

Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri.

Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara.

Tergugat III : Pemerintah Kota Pematangsiantar cq. Wali Kota Pematangsiantar.

Tergugat IV : Pemerintah Kota Pematangsiantar cq. Wakil Wali Kota Pematangsiantar.

Tergugat V : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar cq. Ketua DPRD Kota Pematangsiantar

Atas Perkara: Gugatan atas pembatalan secara sepihak oleh tergugat III atas ruislag RSU Pematangsiantar.

Kesimpulan:

Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 Nopember 2008 memutuskan menghukum para tergugat sebesar Rp497.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan atas putusan ini pihak tergugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan keputusan bahwa pihak tergugat I, II, III, dan IV membayar kerugian materil penggugat sebesar Rp1.392.000.000,00 (Satu miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah). Atas keputusan ini Pemerintah Kota Pematangsiantar memiliki potensi Kewajiban sebesar Rp1.392.000.000,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

3. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

a. Sejarah Singkat Entitas

Tahun 1904 adalah merupakan titik awal Pematangsiantar menjadi sebuah kota yang diperintahkan Raja Marga Damanik bernama Sang Nawaluh. Karena menentang kerja paksa yang ditetapkan Belanda, pada Tahun 1906 Raja Siantar Sang Nawaluh ditangkap dan dibuang ke Bengkulu.

Belanda kemudian merencanakan pembentukan Pematangsiantar menjadi sebuah kota yang mempunyai hak otonomi dengan membentuk suatu badan yang disebut "*Nagori Fonds*".

Pada tahun 1910 didirikanlah Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917, dengan dikeluarkannya Stad Blad 1917 No. 285 "*Nagori Fonds*" berubah menjadi "*Gemente*" yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 sesuai dengan Stad Blad 1938 No. 717 status Kota Pematangsiantar berubah menjadi *Staads Gemente Raad*. Pada masa pendudukan Jepang, Pematangsiantar berubah kembali menjadi Daerah Otonom dan Dewan Kota dibentuk dengan anggotanya dari wakil-wakil Partai. Pemerintahan dijalankan oleh Wali Kota, Dewan Pimpinan Harian dan Dewan Kota. Di waktu pendudukan Belanda tahun 1947-1949 Pematangsiantar kembali menjadi *Staads Gemente* yang mempunyai Wali Kota sendiri tetapi tidak mempunyai Dewan Kota. Pada tahun 1948 dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948, Sistem Pemerintahan berubah dari *Staads Gemente* menjadi Kota Besar Pematangsiantar.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 Kota Pematangsiantar berubah menjadi Kota Praja Penuh. Selanjutnya berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kota Praja Pematangsiantar berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas 4 (empat) wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Kelurahan. Kemudian diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1986, dimana 9 Kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi Wilayah Kota Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 kelurahan.

Pada Tahun 2007 Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan pemekaran Kecamatan Siantar Martoba menjadi dua kecamatan melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Sitalasari, sehingga wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi delapan Kecamatan yang terdiri dari 53 Kelurahan.

Tahun 2008 Kecamatan Siantar Marihat dimekarkan menjadi dua kecamatan sehingga terbentuk Kecamatan Siantar Marimbun yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2007, sehingga wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi 8 Kecamatan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

b. Administrasi Pemerintahan

Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 Kecamatan dan 53 Kelurahan dengan tipe swasembada. Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Tahun 2023 sebanyak 274.838 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.620 jiwa per km².

Untuk bisa memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mempersiapkan aparat pemerintah kota dengan kondisi unit kerja dan jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai berikut.

Tabel 6.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan per SKPD Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Dinas Pendidikan	0	36	606	509	1151
2	Dinas Kesehatan	1	89	436	125	651
3	RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar	1	51	167	113	332
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	12	28	9	51
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3	14	32	6	55
6	Sekretariat Daerah	6	21	84	16	127
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	8	17	4	32
8	Inspektorat	0	2	33	18	53
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	4	9	7	20
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0	22	22	4	48
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4	12	6	22
12	Kantor Camat Siantar Barat	0	17	45	1	63
13	Kantor Camat Siantar Timur	1	11	42	0	54
14	Kantor Camat Siantar Utara	0	17	47	1	65
15	Kantor Camat Siantar Selatan	1	2	37	1	41
16	Kantor Camat Siantar Martoba	0	10	45	1	56
17	Kantor Camat Siantar Marihat	0	11	43	2	56
18	Kantor Camat Siantar Sitalasari	0	7	34	1	42
19	Kantor Camat Siantar Marimbun	1	7	33	1	42



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Satuan Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	5	18	7	30
21	Dinas Ketenagakerjaan	0	3	11	5	19
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	7	30	14	51
23	Dinas Lingkungan Hidup	8	29	22	8	67
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	2	24	8	34
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	3	18	5	27
26	Dinas Perhubungan	2	35	31	2	70
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	6	15	3	24
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0	6	29	6	41
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	3	28	7	38
30	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0	7	14	8	29
31	Dinas Pariwisata	0	8	23	5	36
32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	7	24	11	42
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	14	66	8	89
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	4	34	4	42
35	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	22	17	4	46
	Jumlah	34	506	2176	930	3646



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pematangsiantar TA 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2023 ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar bertekad untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah.


WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah di susun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pematangsiantar, 21 Mei 2024

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SUSANTI DEWAYANI', written over a faint circular stamp or watermark.

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A